

prakarsa

Membangun Pikiran Kritis dan Memperkuat Prakarsa Masyarakat

warta dwi-bulanan ksppm
no. 129/January-Juni/ XLI/2026
ISSN: 021-1863

Menata Ulang Masa Depan: Harapan Rakyat Pasca TPL



Salam dari Sopo... ,

Para pembaca Prakarsa di mana pun berada, Prakarsa edisi January-Juni 2026 kini hadir di tengah pembaca. Pada edisi ini, Prakarsa mengangkat harapan dan imajinasi masa depan masyarakat adat atas tanah adat yang selama bertahun-tahun dikuasai PT TPL. Kami berharap edisi ini tidak hanya menjadi dokumentasi perjuangan, tetapi menyoroti perjuangan masyarakat adat, situasi setelah pencabutan izin PT TPL, dan harapan mereka untuk masa depan.

Selamat membaca. Semoga edisi ini menumbuhkan harapan, memperkuat komitmen kita untuk terus mendukung perjuangan masyarakat adat, dan bersama-sama membayangkan masa depan yang lebih adil bagi tanah adat dan generasi yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar 03

Oleh Ompui Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan

Kemenangan yang Ditunggu Jutaan Hari 05

Gotong Royong: Modal Sosial dalam Membangun Kemandirian Kampung

TPL Telah Tutup: Perjuangan Belum Usai

Lebih Banyak Mudarat Daripada Manfaat

Menjaga Tanah, Merawat Harapan: Kisah Robinsar Simanjuntak

Sonari Manang Daong Salelengna: Ancaman Krisis Iklim Terhadap Perempuan

Alam Tidak Bisa Berbohong: Tragedi Ekologis Sumatra menjadi Bukti

Perlawanan yang Dihasilkan Konflik Berkepanjangan 23

Malam Kemenangan, Awal Perjuangan Baru

Tanah Leluhur, Tempat Kami Hidup

“*Hagiot*”: Nilai yang Menghidupi Perjuangan Rakyat Angkola

Kisah Masyarakat Angkola Melawan TPL

Kemenangan yang Mesti Dikawal: Perjuangan Belum Selesai di Tanah Adat

TPL Tutup, Lalu Siapa Menanggung Kerusakan Hutan?

Siapa yang Menguasai Tanah? 41

Adat Menjawab Ketimpangan? Refleksi Kristis atas Pengakuan MA dan Masa Depan Reforma Agraria

Setelah Izin TPL Dicaput, Siapa Menguasai Tanah?

Harapan Petani di Samosir Pasca Penutupan TPL

Berita Sopo 50

prakarsa

Diterbitkan oleh
Perhimpunan Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa
Masyarakat (KSPPM)

Alamat Redaksi
Girsang 1, Sipanganbolon
Kec. Girsang Sipanganbolon
Parapat - 21174
Telp. 62-625-42393

E-mail:
pkspm@yahoo.com

Website:
www.kspm.org

FB: Kspm Parapat
IG: @kspm.parapat

ISSN: 0215-1863

Redaksi:

Penanggung Jawab: Roki Pasaribu. **Pimpinan Redaksi:** Roki Pasaribu. **Editor:** Asi Sitinjak, Yudithy Siahaan **Dewan Direksi:** Angela Manihuruk, Iwan Bernando Samosir, Lambok Lumban Gaol, Sandres Siahaan, Saor Abadi Aritonang, Bona Tua Purba, Yacob Napitupulu, Delima Padang, Susi Yanti Halawa, Hilarius Sihombing, Johannes Tamba, Lestina Sitanggang, Yengi Tampubolon, Asi Sitinjak. **Staf Keuangan:** Harry Nainggolan. **Administrasi/Distributor:** Yudithy Siahaan, Angel Harefa, Dewi Sirait, Irwan Pakpahan

Untuk memperkaya isi Prakarsa ini redaksi menerima sumbangan pikiran, artikel, berita, ulasan dari khalayak pembaca. Pandangan dan pendapat penulis yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat atau pandangan redaksi. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengurangi makna.

Kata Pengantar

TERLIHAT MUSTAHIL, TAPI JADI KENYATAAN

Rahasia Keberhasilan Perjuangan Menutup PT. TPL

PERJUANGAN menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) bukanlah ledakan emosi sesaat, melainkan proses Panjang yang ditempa oleh iman, kesabaran, data dan kebijaksanaan kolektif. Keberhasilannya bukanlah kebetulan, melainkan buah dari cara berjuang yang bermartabat dan berpegang teguh pada kebenaran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang menopang keberhasilan Gerakan menutup TPL:

1. Berjuang dengan iman, doa dan data

Gerakan ini tidak dibangun di atas amarah, melainkan pada iman yang berdoa dan akal sehat yang bekerja. Doa memberi kedalaman batin, sementara data memberi bobot rasional dan legitimasi publik. Pesan disampaikan dengan bahasa yang santun, argumentatif dan beradab. Sungguh kombinasi yang membuat suara rakyat sulit diabaikan!

2. Penolakan yang panjang dan meluas

Penolakan terhadap TPL bukanlah isu baru atau aspirasi segelintir orang. Ia telah lama hidup dalam kesadaran kolektif warga yang merasakan langsung dampak ekologis dan sosial. Karena lahir dari pengalaman nyata, suara ini bersifat otentik dan berakar kuat di tengah masyarakat.

3. Perjuangan akan identitas, harkat manusia dan jeritan alam

Keluhan atas dampak negatif dan penderitaan rakyat bukanlah isapan jempol, melainkan realitas pahit yang dialami selama puluhan tahun. Sejak era PT IJU hingga TPL, pencemaran udara, air dan tanah telah mengancam kesehatan manusia serta kelestarian flora dan fauna. Selain krisis lingkungan, konflik agrarian berkepanjangan telah melukai rasa keadilan dan martabat masyarakat. Muncul kesadaran kolektif yang mempertanyakan mengapa sebuah entitas yang

datang ke Tanah Batak justru mengancam dan merendahkan martabat orang Batak di tanah kelahirannya sendiri? Oleh karena itu, gerakan ini tidak hanya perjuangan berbasis hak (rights-based movement), tetapi juga perjuangan mempertahankan identitas dan harga diri (identity-based movement). Menutup TPL dipahami sebagai Upaya memulihkan kedaulatan rakyat atas tanah dan kehormatannya.

4. Momentum kepemimpinan nasional

Perjuangan ini menemukan momentumnya ketika negara dipimpin oleh Presiden yang mengusung visi Asta Cita, khususnya komitmen terhadap kelestarian alam. Agenda nasional ini menciptakan ruang etis dan politis yang selaras dengan aspirasi rakyat. Negara dan rakyat akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama: keberlanjutan kehidupan. Keberhasilan ini juga ditopang oleh kebijaksanaan Presiden yang tidak semata bergantung pada laporan birokrasi yang berpotensi bias, melainkan berkenan turun langsung ke lapangan. Kemauan pemimpin untuk menangkap realitas secara utuh seringkali menjadi titik balik sejarah.

5. Peran strategis media

Media menjadi ruang gema yang memperluas jangkauan perjuangan. Media konvensional memberikan legitimasi, sementara media sosial menghadirkan kesaksian personal dan membangun solidaritas lintas wilayah. Melalui media, fakta dan suara korban menembus ruang publik secara luas.

6. Solidaritas tanpa sekat perbedaan

Gerakan ini kuat karena inklusivitasnya. Orang tua, kaum muda, mahasiswa, serta tokoh lintas denominasi dan lintas agama berdiri bersama. Kekompakan ini mengirimkan pesan yang jelas: perjuangan ini bukan milik satu kelompok, melainkan Jeritan bersama demi masa depan kolektif.

7. Integritas tanpa kepentingan pribadi

Para pejuang dalam gerakan ini tidak didorong oleh ambisi pribadi atau keuntungan tersembunyi. Fokusnya sederhana dan jernih: melihat kenyataan, mendengar jeritan alam, dan bertindak. Ketulusan inilah yang memberikan integritas moral tinggi pada gerakan ini.

8. Kekuatan bukti dan studi ilmiah

Perjuangan ini berbasis pada data yang kuat. Hasil studi ilmiah diperkuat oleh kesaksian hidup warga yang mengalami dampak secara langsung. Fakta akademik dan pengalaman nyata saling mengunci dan menguatkan posisi perjuangan.

9. Dukungan moral dan spiritual lintas elemen

Keterlibatan para Pendeta HKBP dari seluruh distrik, pernyataan sikap Rapat Pendeta Hatopan, dukungan para Pastor dan Suster Katolik, Ulama, Sekber Gokesu, LSM (terutama KSPPM dan AMAN Tano Batak), dosen dan mahasiswa, ormas Kristen (seperti GAMKI dan GMKI), para pendamping masyarakat, pegiat lingkungan dan banyak elemen lainnya memberi bobot moral dan spiritual yang sangat besar bagi perjuangan ini.

10. Lobi yang positif dan etis

Pendekatan kepada tokoh, pejabat, aktivis dan pemerhati dilakukan melalui argumentasi cerdas dan etika komunikasi, bukan tekanan kasar. Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam berdialog dan kecerdasan strategi para penggerak gerakan.

11. Keteguhan dalam prinsip

Gerakan ini secara sadar menghindari dialog yang berujung pada tawar-menawar kompromistis dengan perusahaan. Dalam hal ini, keadilan ekologis tidak dapat diperdagangkan, atau digantikan oleh solusi semu.

12. Menjaga kedamaian (tanpa kekerasan)

Tidak ada konfrontasi fisik dalam perjuangan ini. Bahkan ketika ruang untuk berdoa dilarang, gerakan memilih mengalah dan berpindah lokasi demi menjaga perdamaian. Mengalah demi damai adalah ekspresi kekuatan moral, bukan tanda kelemahan.

13. Aksi damai yang tepat sasaran

Aksi tidak diarahkan secara anarkis ke pabrik atau lokasi operasional, melainkan kepada para pengambil kebijakan dan pemberi rekomendasi. Pemahaman yang jernih atas alur birokrasi membuat perjuangan berjalan efektif tanpa memakan korban. Tidak sedikit pihak yang menghendaki penutupan jalan di Sirait Uruk atau demonstrasi langsung ke pabrik TPL,

namun pilihan damai dan strategis tetap dipegang.

14. Narasi yang simpatik dan inklusif

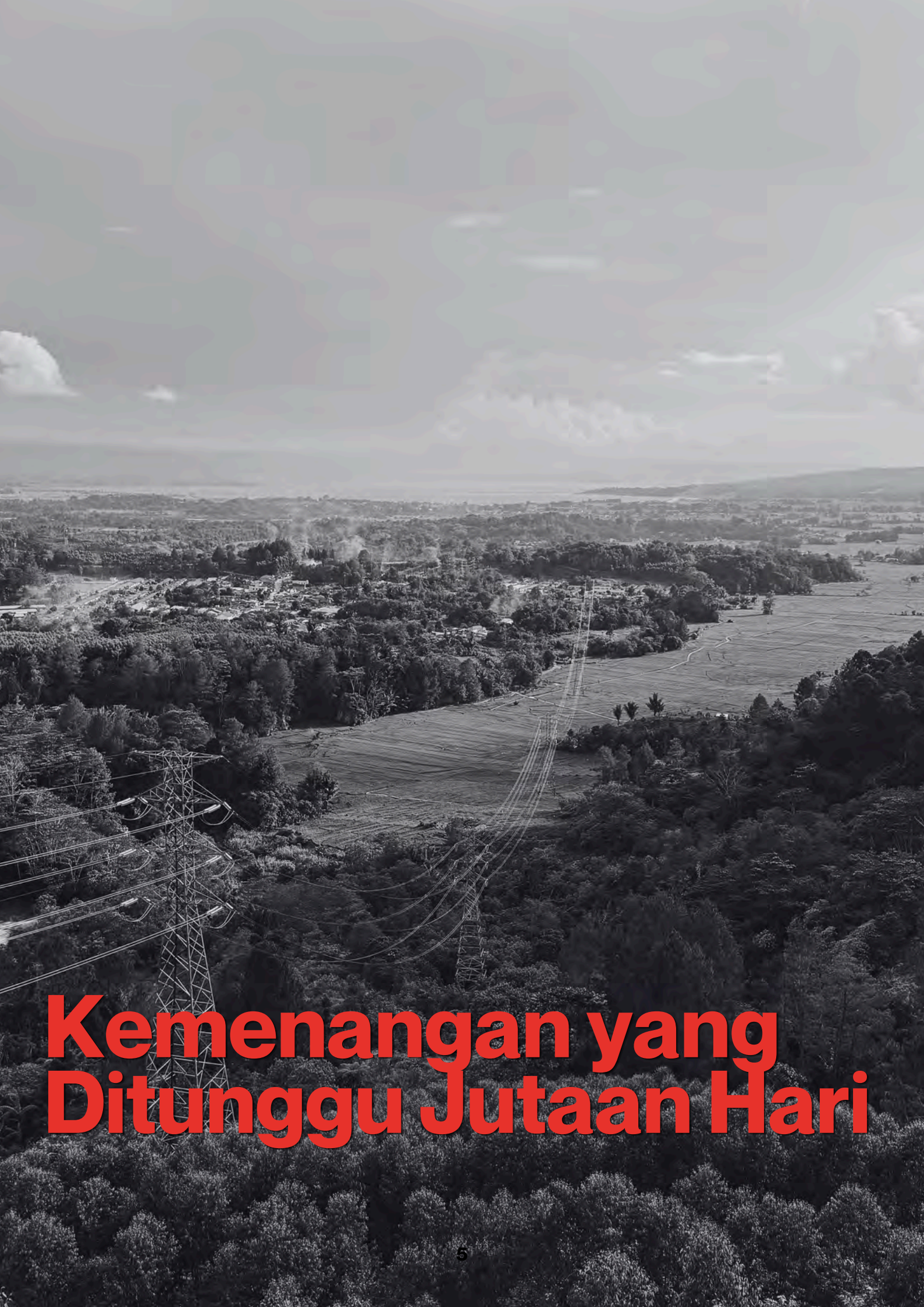
Gerakan ini tidak menyerang pribadi-pribadi yang berada di pihak pembela TPL. Narasi yang simpatik membuat dukungan publik tetap mengalir dan marwah perjuangan terpelihara hingga akhir. Sebaliknya, penggunaan Bahasa kasar dan tidak etis oleh Sebagian pendukung TPL di media sosial justru memperbesar simpati publik kepada gerakan penutupan TPL, termasuk dari mereka yang sebelumnya tidak peduli.

15. Suara alam dan kesaksian bencana

Bencana alam seperti banjir dan longsor yang berulang menjadi saksi jujur atas kerusakan ekosistem yang terjadi. Ini menegaskan bahwa persoalan yang diperjuangkan bukanlah ancaman abstrak, melainkan bahaya nyata dan mendesak. Puncaknya, bencana ekologis pada Desember 2025 yang menelan banyak korban menjadi faktor penentu dalam keputusan penutupan PT TPL. Pada intinya, perjuangan menutup TPL berhasil karena ia berjalan di jalur yang benar: iman yang berdoa, akal sehat yang bekerja, data yang berbicara dan hati yang setia pada kehidupan. Ketika kebenaran diperjuangkan dengan cara yang bermartabat, sejarah pada akhirnya akan berpihak kepada kehidupan.



Dr. Victor Tinambunan MST.
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)



Kemenangan yang Ditunggu Jutaan Hari

Gotong Royong: Modal Sosial dalam Membangun Kemandirian Kampung

Oleh: Iwan Bernando Samosir



Marsiadapari Kelompok Masyarakat Adat Natinggir
DOKUMENTASI KSPPM

Di berbagai wilayah Tapanuli, perubahan sosial dan ekonomi pasca berakhirnya aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL), membawa dampak yang beragam bagi masyarakat. Di sebagian tempat, masyarakat mulai menata ulang sumber penghidupan setelah lama berada dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada perusahaan besar.

Dalam konteks perubahan tersebut, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat bertahan di tengah pergeseran sistem ekonomi. Tidak semua komunitas menghadapi situasi ini dengan cara yang sama. Sebagian mengalami ketergantungan pada sistem kerja upahan, sementara sebagian lain bertumpu pada kekuatan sosial yang telah lama mereka jaga. Di sinilah Komunitas Masyarakat Adat

Natinggir di Kabupaten Toba menjadi contoh yang menarik untuk dilihat.

Di tengah arus modernisasi yang makin kuat, banyak nilai-nilai sosial yang perlahan memudar dari kehidupan masyarakat. Individualisme, persaingan ekonomi, dan perubahan pola hidup membuat hubungan antarwarga menjadi makin renggang. Namun, di tengah perubahan tersebut, masih ada komunitas yang teguh mempertahankan nilai kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Salah satunya adalah Komunitas Masyarakat Adat Natinggir di Kabupaten Toba.

Bagi Masyarakat Adat Natinggir, gotong royong bukan sekadar tradisi yang diwariskan dari leluhur. Gotong royong adalah cara hidup, nilai yang menuntun hubungan antarmanusia, sekaligus kekuatan yang

menjaga keberlangsungan komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat saling membantu hadir dalam berbagai aktivitas, mulai dari mengolah lahan pertanian, membangun rumah, melaksanakan upacara adat, hingga menjaga lingkungan hidup.

Di Natinggir, hubungan sosial tidak dibangun di atas kepentingan pribadi semata. Setiap orang menyadari bahwa kehidupan yang baik hanya dapat terwujud apabila seluruh anggota komunitas saling menopang. Karena itu, ketika ada pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga, masyarakat tidak membiarkan seseorang bekerja sendirian. Mereka datang membantu dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut Rudolf Pasaribu, salah seorang penatua adat, gotong royong masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat Natinggir. Nilai ini terutama terlihat dalam kegiatan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Sebagian besar warga Natinggir bekerja sebagai petani. Dalam proses bercocok tanam, mulai dari membuka lahan, menanam padi, membersihkan sawah, membuat pupuk kompos, hingga panen, masyarakat saling membantu satu sama lain. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya mempercepat pekerjaan, gotong royong juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan antarsesama warga.

Semangat yang sama juga terlihat ketika ada warga yang membangun rumah. Pembangunan rumah di Natinggir bukan hanya urusan keluarga yang bersangkutan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama komunitas. Warga datang membantu mengumpulkan kayu, mengangkat bahan bangunan, hingga mendirikan rumah. Tidak ada upah yang diberikan. Sebagai gantinya, tuan rumah biasanya menyediakan makanan sederhana sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada warga yang telah membantu.

Tradisi ini menunjukkan bahwa rumah bukan hanya

bangunan fisik, melainkan simbol kebersamaan yang dibangun melalui solidaritas sosial. Setiap rumah yang berdiri di Natinggir sesungguhnya menyimpan jejak tangan banyak orang yang bekerja bersama.

Gotong royong juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai upacara adat. Dalam Masyarakat Adat Natinggir, upacara adat bukan hanya milik satu keluarga, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan seluruh komunitas. Persiapan yang membutuhkan tenaga dan biaya besar tidak mungkin dilakukan sendiri.

Karena itu, masyarakat bekerja sama menyiapkan makanan, perlengkapan adat, hingga berbagai kebutuhan ritual. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa keberhasilan suatu upacara merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan seperti ini, nilai kebersamaan dan rasa memiliki terhadap tradisi leluhur terus dipelihara dari generasi ke generasi.

Hubungan Masyarakat Adat Natinggir dengan alam juga tercermin dalam praktik gotong royong. Mereka meyakini bahwa alam bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Oleh sebab itu, masyarakat secara rutin melakukan kerja bersama untuk membersihkan sungai, memperbaiki jalan kampung, menanam pohon, dan menjaga kawasan hutan adat.

Kesadaran kolektif ini lahir dari pemahaman bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada satu orang, tetapi akan memengaruhi seluruh komunitas. Karena itu, menjaga alam dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara gotong royong.



Marsiadapari Kelompok Masyarakat Adat Natinggir
DOKUMENTASI KSPPM

Menurut Sahala Pasaribu, Ketua Komunitas Masyarakat Adat Natinggir, gotong royong mengandung berbagai nilai penting yang menjadi fondasi kehidupan Masyarakat Adat. Nilai pertama adalah kebersamaan. Melalui gotong royong, masyarakat belajar bahwa pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah apabila dilakukan bersama.

Selain itu, terdapat nilai solidaritas yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Ketika ada warga yang mengalami kesulitan, masyarakat hadir membantu tanpa menunggu diminta. Sikap ini menciptakan rasa aman dan memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas.

Gotong royong juga mengandung nilai tanggung jawab. Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban moral untuk ikut menjaga kepentingan bersama. Nilai ini kemudian melahirkan persatuan yang kuat karena masyarakat terbiasa bekerja sama dan menghargai satu sama lain. Yang tidak kalah penting adalah nilai keikhlasan. Gotong royong dilakukan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas.

Hal senada disampaikan oleh Rumentu Pasaribu. Menurutnya, gotong royong memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan Masyarakat Adat Natinggir. Melalui kerja bersama, hubungan kekeluargaan makin erat dan konflik sosial dapat diminimalkan. Gotong royong juga membantu masyarakat mempertahankan tradisi yang diwariskan leluhur, sekaligus meringankan beban ekonomi karena pekerjaan dapat diselesaikan bersama-sama.

Lebih jauh lagi, praktik gotong royong berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hutan, sungai, dan lahan adat tetap terpelihara karena masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk merawatnya.

Di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung, keberadaan budaya gotong royong di Natinggir menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam konteks pasca perubahan sosial-ekonomi di wilayah Tapanuli setelah

berhentinya aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ketika sebagian wilayah menghadapi proses penyesuaian dan pencarian kembali sumber penghidupan, Natinggir menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak selalu bergantung pada kehadiran perusahaan besar, melainkan pada kekuatan solidaritas di dalam komunitas itu sendiri.

Karena itu, gotong royong tidak boleh dipandang sebagai warisan masa lalu yang usang. Sebaliknya, dia merupakan modal sosial yang sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan masa kini, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga krisis lingkungan. Pelestarian budaya gotong royong tidak hanya menjadi tanggung jawab Masyarakat Adat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Salah satu bentuk dukungan yang paling penting adalah pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Adat beserta nilai-nilai budaya yang mereka pertahankan.

Dalam konteks ini, pengakuan resmi terhadap Masyarakat Adat Natinggir menjadi langkah penting yang perlu segera diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba. Sebab, Masyarakat Adat Natinggir merupakan salah satu komunitas yang hingga kini masih mampu menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai budaya yang makin langka di tengah masyarakat modern.

Pada akhirnya, gotong royong bukan hanya tentang bekerja bersama. Dia adalah cerminan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Di Natinggir, gotong royong menjadi napas yang menghidupkan solidaritas, memperkuat persaudaraan, menjaga alam, dan mempertahankan identitas budaya. Selama nilai itu tetap hidup, masyarakat adat Natinggir akan terus menjadi penjaga warisan luhur yang makin berharga di tengah dunia yang terus berubah.

TPL Telah Tutup : Perjuangan Belum Usai

Oleh: Delima Padang

"Seandainya dulu perusahaan sebesar ini tidak merasa paling berkuasa, tidak merebut tanah Masyarakat Adat, tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan, mungkin warung kecil kami masih ramai hingga sekarang. Setidaknya masih bisa membantu perekonomian keluarga."

Kalimat itu terlontar dari seorang perempuan paruh baya yang telah bertahun-tahun mengelola kantin di sekitar kawasan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Nada suaranya terdengar kesal, tetapi sekaligus pasrah. Dia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang merasakan dampak langsung pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL. Namun baginya, persoalan ini tidak sesederhana kehilangan pelanggan atau berkurangnya pendapatan. Ada sejarah panjang yang mendahuluinya.

Malam 20 Januari 2026 menjadi malam yang sulit dilupakan oleh banyak orang di Tanah Batak. Melalui siaran televisi nasional, masyarakat mengetahui bahwa pemerintah mencabut PBPH PT TPL bersama sejumlah perusahaan lain yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang terjadi di Sumatra Utara pada November 2025.

Berita itu menyebar dengan cepat. Media sosial dipenuhi komentar. Di warung kopi dan lapo tuak, perdebatan berlangsung hingga larut malam. Sebagian masyarakat menyambut keputusan tersebut dengan sukacita karena menganggapnya sebagai kemenangan dari perjuangan panjang Masyarakat Adat dan kelompok lingkungan. Sebagian lainnya merasa cemas karena kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Tidak sedikit pula yang memilih menunggu, mengingat sejarah pernah mencatat bahwa PT Inti Indorayon Utama sempat ditutup, lalu kembali beroperasi dengan nama baru: PT Toba Pulp Lestari.

Empat bulan setelah pencabutan izin itu, suasana di sekitar pabrik berubah drastis. Gerbang-gerbang yang dahulu sibuk kini tertutup rapat. Tidak ada lagi kepulan asap dari cerobong pabrik yang selama puluhan tahun menjadi penanda aktivitas industri di Porsea. Truk-truk pengangkut kayu yang biasanya

memenuhi jalan raya tidak lagi terlihat. Alat berat yang dulu bekerja tanpa henti kini diam membeku di tempatnya. Kampung-kampung yang dahulu hidup dalam ritme pabrik memasuki fase baru: fase transisi yang penuh ketidakpastian, tetapi juga menyimpan harapan.

Di Desa Siantar Utara (Siruar), tepat di belakang kawasan pabrik, perubahan itu tampak jelas. Sebagian warga yang sebelumnya bekerja sebagai buruh mulai kembali mengolah sawah dan ladang. Ada yang menanam padi, ada yang mengurus kebun, dan ada pula yang menggembalakan ternak sebagai pekerjaan tambahan.

Seorang penggembala lembu yang juga bertugas menjaga bendungan PLTA Sungai Asahan mengakui bahwa pencabutan izin TPL sempat membuat banyak warga terkejut. *"Awalnya memang kaget karena tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Tetapi setelah itu orang-orang kembali bekerja seperti biasa. Sampai sekarang belum ada yang tidak makan karena TPL tutup. Tanah di sini sebenarnya subur kalau dikelola dengan baik,"* ujarnya.

Namun tidak semua orang merasakan perubahan dengan cara yang sama. Di Panatapan Simangkuk,



DOKUMENTASIKSPPM

Pabrik PT TPL setelah hampir empat bulan tidak beroperasi

seorang pedagang mengaku pendapatannya menurun sejak pabrik berhenti beroperasi. Warung yang dahulu ramai oleh pekerja kini lebih sering sepi. Dia juga menyoroti nasib anak-anak karyawan yang sebelumnya memperoleh bantuan pendidikan dari perusahaan.

Meski demikian, dia tidak sepenuhnya menyalahkan keputusan pencabutan izin tersebut. *"Saya juga akan marah kalau tanah warisan nenek moyang saya direbut hanya karena ada izin dari pemerintah,"* katanya. *"Kalau dari awal perusahaan tidak berkonflik dengan Masyarakat Adat, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini."*

Pernyataan itu menggambarkan situasi yang kompleks. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan akibat berhentinya aktivitas perusahaan. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa persoalan yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang berlangsung selama puluhan tahun.

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui Teori Ketergantungan yang dikemukakan Andre Gunder Frank.

Dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada satu perusahaan besar, masyarakat perlahan menjadi bergantung pada keberadaan perusahaan tersebut. Ketika perusahaan berkembang, masyarakat ikut bergerak. Namun ketika perusahaan berhenti, masyarakat menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Ketergantungan semacam ini sering kali membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk membangun kemandirian ekonomi yang lebih beragam.



Kacang merah, yang di tanam di wilayah adat Op. Raja Nasomalomarhohos Natinggir
DOKUMENTASI KSPPM

Meski demikian, tidak semua perubahan pasca pencabutan izin dipandang negatif.

Di Porsea, sejumlah warga merasakan perubahan yang selama ini sulit dibayangkan. Jalanan menjadi lebih lengang, udara terasa lebih bersih, dan debu yang biasanya beterbangan akibat aktivitas truk pengangkut kayu berkurang drastis.

"Sekarang lebih tenang, lebih rapi, tidak berdebu," ujar seorang pedagang di pinggir jalan raya Porsea.

Perubahan serupa juga dirasakan oleh Masyarakat Adat yang selama ini hidup berdampingan dengan perkebunan eukaliptus dan konflik berkepanjangan. Di Natinggir, wilayah adat yang sebelumnya menjadi sumber sengketa kini mulai kembali dikelola sebagai lahan pertanian. Masyarakat menanam jahe, cabai, kacang merah, jagung, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Tanah yang sebelumnya tertutup tanaman industri perlahan kembali menjadi ruang hidup masyarakat.

Bagi mereka, pencabutan PBPH PT TPL bukan sekadar penghentian aktivitas sebuah perusahaan. Keputusan tersebut membuka peluang bagi pemulihan hubungan antara manusia, tanah, dan alam yang selama puluhan tahun terputus oleh konflik dan ekspansi industri.

Perjuangan belum berakhir

Hingga hari ini, sebagian besar konflik agraria di kawasan eks konsesi TPL belum terselesaikan. Wilayah adat yang diperjuangkan masyarakat masih membutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Kekhawatiran terhadap kemungkinan hadirnya investasi baru atau peninjauan kembali kebijakan pencabutan izin juga masih membayangi banyak komunitas.

Karena itu, pencabutan PBPH PT TPL seharusnya tidak dipahami sebagai akhir dari sebuah konflik, melainkan sebagai awal dari pekerjaan besar yang lain: pemulihan lingkungan, penyelesaian konflik agraria, dan pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Perlawanan memang telah membuahkan hasil. Namun bagi Masyarakat Adat di Tanah Batak, perjuangan sesungguhnya baru memasuki babak baru.

Lebih Banyak Mudarat Daripada Manfaat

Oleh: Asi Sitinjak

Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan untuk menolak pencabutan izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) adalah alasan ekonomi. Sekilas, argumen ini terdengar masuk akal. Ketika sebuah perusahaan berhenti beroperasi, pihak yang paling terdampak tentu adalah para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut. Di tengah tingginya angka pengangguran, kehilangan pekerjaan dapat mengubah kehidupan seseorang dan keluarganya secara drastis.

Seorang pemilik warung di sekitar kawasan pabrik TPL yang kini tidak lagi beroperasi mengisahkan perubahan yang dia rasakan setelah perusahaan berhenti beraktivitas. Menurutnya, banyak pekerja kehilangan sumber penghasilan, bahkan berbagai fasilitas yang sebelumnya mereka terima, termasuk bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaku usaha kecil di sekitar perusahaan. Warung-warung yang selama ini bergantung pada kehadiran pekerja dan staf TPL mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan.

Kenyataan ini tentu tidak dapat diabaikan. Namun, dampak ekonomi yang dialami para pekerja tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghidupkan kembali TPL. Penutupan perusahaan bukanlah peristiwa yang terjadi secara mendadak tanpa tanda-tanda. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun, TPL semestinya memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan proses transisi yang layak bagi para pekerjanya.

Secara hukum, perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, mulai dari pesangon, penghargaan masa kerja, hingga penggantian hak lainnya. Lebih jauh lagi, perusahaan yang menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas semestinya membantu proses penyaluran

kerja, memberikan rekomendasi, atau bentuk dukungan lain yang dapat membantu para pekerja memasuki fase kehidupan berikutnya. Pada akhirnya, ukuran kepedulian perusahaan terhadap pekerja bukanlah slogan atau iklan yang dipasang di ruang publik, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan oleh para pekerja itu sendiri.

Persoalannya, selama ini terdapat jarak yang cukup lebar antara citra yang dibangun TPL dengan kenyataan yang dialami masyarakat di lapangan. Di berbagai sudut wilayah Toba, masyarakat dapat menemukan papan-papan informasi yang menampilkan kontribusi perusahaan dalam pembangunan jalan, bantuan pendidikan, maupun berbagai program sosial lainnya. Semua itu membangun kesan bahwa TPL merupakan perusahaan yang hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas yang dihadapi Masyarakat Adat sering kali berbeda.

Ketika sejumlah jalan utama mendapatkan perhatian dan perbaikan, akses menuju kampung-kampung Masyarakat Adat justru kerap terabaikan. Jalan menuju Huta Natinggir, misalnya, masih dipenuhi bebatuan besar dan tajam yang menyulitkan mobilitas warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak selalu menjangkau masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan wilayah konsesi perusahaan.



Masyarakat Adat Natinggir dan Natumingka merayakan Hari Peringatan Lingkungan Hidup

DOKUMENTASI KSPRM

Lebih dari sekadar persoalan infrastruktur, Masyarakat Adat juga harus menghadapi konflik agraria yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Pada 7 Agustus 2025, puluhan karyawan dan petugas keamanan TPL mendatangi wilayah adat Natinggir dan melakukan pengusuran terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan tanah leluhurnya.

Peristiwa tersebut merupakan bagian dari konflik panjang antara Masyarakat Adat dan perusahaan terkait penguasaan lahan. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat menuduh perusahaan mencabut tanaman milik warga dan menggantinya dengan eucalyptus, sementara Masyarakat Adat terus berupaya mempertahankan serta menanam kembali wilayah yang mereka yakini sebagai tanah adat.

Konflik yang berkepanjangan itu tidak hanya menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kekerasan. Masyarakat mengalami intimidasi, kekerasan fisik, perusakan rumah dan sarana transportasi, hingga tekanan psikologis yang mendalam. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sebuah perusahaan dapat disebut berkontribusi bagi masyarakat jika pada saat yang sama keberadaannya justru melahirkan konflik dan penderitaan bagi sebagian warga?



Ladang jagung masyarakat Natinggir yang dulunya adalah lahan eukaliptus milik TPL
DOKUMENTASI KSPPM

Cerita dari para buruh memperlihatkan persoalan yang tidak jauh berbeda. Seorang warga Natinggir yang pernah bekerja untuk TPL mengungkapkan bahwa upah sering kali bergantung pada pencapaian target kerja. Karena pekerjaan dilakukan di lapangan dan sangat dipengaruhi kondisi cuaca, hari hujan kerap berarti hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan. Dalam beberapa kondisi, upah yang diterima bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara layak.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan TPL tidak secara otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh pekerjanya. Karena itu, anggapan bahwa membuka kembali TPL merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat perlu dikaji secara lebih kritis. Sebab, ketika perusahaan masih beroperasi pun, banyak pekerja tetap hidup dalam kondisi rentan dan jauh dari kata sejahtera.

Sebaliknya, setelah izin TPL dicabut, sejumlah Masyarakat Adat mulai merasakan ruang yang lebih luas untuk mengelola tanah dan sumber daya alam mereka sendiri.

Di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang konflik, masyarakat kini dapat kembali mengolah lahan tanpa rasa takut. Berbagai jenis tanaman mulai dibudidayakan, produktivitas pertanian meningkat, dan perlahan-lahan pendapatan keluarga ikut membaik. Bagi Masyarakat Adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang menopang keberlangsungan generasi.

Di Natinggir, perubahan tersebut dirasakan secara nyata. Warga mengaku udara yang sebelumnya dipenuhi debu kini terasa lebih bersih dan sejuk. Sumber-sumber air yang dahulu keruh atau sulit diakses mulai kembali jernih dan tersedia untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka juga tidak lagi dihantui kecemasan ketika berangkat ke ladang. Energi yang selama bertahun-tahun terkuras untuk mempertahankan tanah kini dapat difokuskan pada kegiatan produktif yang meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Meskipun demikian, pencabutan izin TPL bukanlah akhir dari perjuangan. Kerusakan ekologis yang ditinggalkan oleh praktik monokultur eucalyptus selama puluhan tahun tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas tanah, dan terganggunya keseimbangan ekosistem merupakan persoalan yang masih harus dihadapi bersama.

Aek Raja menjadi salah satu contoh yang sering disebut masyarakat. Dahulu wilayah ini dikenal

tanaman produktif lainnya yang mampu mengembalikan fungsi ekologis kawasan.

Di sinilah pentingnya kerja-kerja pendampingan masyarakat yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk KSPPM. Perjuangan Masyarakat Adat hari ini bukan hanya tentang memperoleh kembali tanah yang selama ini diperebutkan, tetapi juga tentang memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan alam.



Tanaman tampak kering akibat pohon eukaliptus di Aek Raja

DOKUMENTASIKSPPM

memiliki banyak sumber mata air yang menopang kehidupan warga. Namun, setelah ekspansi perkebunan eucalyptus secara masif, banyak sumber air yang berangsur-angsur mengering. Karena itu, pemulihan ekologis menjadi agenda penting pasca pencabutan izin TPL. Upaya tersebut memerlukan penggantian tanaman monokultur dengan vegetasi yang lebih beragam dan ramah lingkungan, seperti pohon buah-buahan, haminjon, serta berbagai

Proses pemulihan itu mungkin membutuhkan waktu yang panjang, bahkan melintasi generasi. Namun, jalan tersebut tetap harus ditempuh. Sebab, tujuan akhirnya bukan sekadar menghentikan kerusakan, melainkan membangun masa depan yang lebih adil, di mana Masyarakat Adat dapat hidup bermartabat di atas tanahnya sendiri, sekaligus mewariskan lingkungan yang sehat dan lestari kepada generasi yang akan datang.

Menjaga Tanah, Merawat Harapan: Kisah Robinsar Simanjuntak

Oleh: Abadi Aritonang

Namanya Robinsar Simanjuntak, namun sehari-hari dia lebih dikenal sebagai Pak Putra. Bersama istrinya, boru Tobing, dan ketiga anak mereka, dia tinggal di Huta Mamukka. Pak Putra merupakan bagian dari keturunan Op. Bolus, sebuah komunitas adat yang memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Tanah Napa di Sipahutar.

Bagi Pak Putra, Tanah Napa bukan sekadar hamparan lahan pertanian. Tanah itu adalah ruang hidup yang menyimpan jejak leluhur, identitas keluarga, dan harapan bagi generasi yang akan datang.

“Tanah ini bukan hanya tempat mencari makan. Di sinilah leluhur kami hidup, bekerja, dan membangun kehidupan. Kalau tanah ini hilang, kami juga kehilangan sebagian dari diri kami” ujarnya.

Bagi keluarga Op. Bolus, tanah adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Menjaga Tanah Napa berarti menjaga keberlanjutan identitas sebagai keturunan leluhur yang telah mewariskan tanah tersebut secara turun-temurun.

Awal Keterlibatan dalam Perjuangan Tanah Napa

Perjalanan Pak Putra dalam mempertahankan Tanah Napa berawal dari sebuah pertemuan sederhana. Saat itu, David Rajagukguk dan Roki Pasaribu datang ke rumahnya. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Op. Rimpun. Dari percakapan yang berlangsung, dia mulai memahami bahwa tanah yang diwariskan leluhur sedang menghadapi berbagai ancaman.

Pertemuan itu mengubah cara pandangnya. Dia mulai mengikuti berbagai diskusi dan pertemuan komunitas. Dari proses tersebut, dia menyadari bahwa mempertahankan tanah bukan hanya urusan segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama seluruh keturunan yang memiliki ikatan sejarah dengan wilayah tersebut.



Robinson Simanjuntak

Semakin sering terlibat dalam berbagai pertemuan, semakin kuat pula keyakinannya bahwa perjuangan mempertahankan tanah bukan sekadar soal mempertahankan lahan dari ancaman kehilangan hak. Perjuangan itu juga menyangkut upaya menjaga sejarah, martabat, dan keberlangsungan hidup komunitas.

Tanah Napa Dikenal karena Kesuburannya

Nama *Napa* berasal dari kata *napu* yang berarti subur. Nama itu lahir dari pengalaman masyarakat yang sejak dahulu mengenal kawasan tersebut sebagai lahan yang mampu menghasilkan berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keinginan untuk menetap dan mengelola lahan di Napa sebenarnya sudah lama dimiliki Pak Putra. Namun saat itu anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan perhatian lebih sehingga dia belum bisa tinggal dan bekerja secara penuh di sana.

Meski demikian, hubungan dengan tanah itu tidak pernah terputus. Baginya, tanah warisan leluhur tidak boleh ditinggalkan begitu saja. *“Kalau tanah tidak dikelola, lama-lama nilainya hilang. Kalau tidak dipertahankan, bisa saja suatu hari jatuh ke tangan orang lain”* katanya. Dia percaya bahwa mengelola tanah adalah bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus investasi bagi masa depan anak-anaknya.

Sebelum serius mengembangkan pertanian di Tanah Napa, sumber penghidupan utama keluarga berasal

dari hutan kemenyan (*haminjon*). Selama bertahun-tahun dia menggantungkan kehidupan dari hasil menyadap getah kemenyan. Dalam satu hingga dua minggu, penghasilannya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi sulit memberikan ruang bagi keluarga untuk berkembang.

Keadaan semakin berat ketika produksi getah kemenyan terus menurun. Perubahan kondisi hutan, kerusakan lingkungan, serta semakin terbatasnya ruang kelola masyarakat akibat masuknya wilayah adat ke dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari membuat hasil kemenyan tidak lagi dapat diandalkan seperti sebelumnya.

Dari pengalaman tersebut, dia belajar bahwa keluarga tidak boleh bergantung pada satu sumber penghasilan. Diperlukan usaha baru yang lebih menjanjikan dan mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

Menghidupkan Kembali Lahan Bekas Eukaliptus

Sekitar tiga hingga empat tahun lalu, Pak Putra mulai serius mengelola Tanah Napa. Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Sebagian besar lahan merupakan bekas areal tanaman eukaliptus yang membutuhkan kerja keras agar kembali produktif.

Banyak orang memandang lahan tersebut sebagai kawasan yang sulit diolah. Namun dia melihat sesuatu yang berbeda. Di balik bekas tanaman industri itu, dia melihat peluang kehidupan. Perlahan-lahan lahan dibersihkan. Tanah diperbaiki. Setiap jengkal dipersiapkan kembali agar dapat ditanami.

Tantangan tidak berhenti di situ. Akses menuju Napa juga cukup berat. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Hasil panen sering kali harus diangkut dengan perjuangan ekstra. Namun semua kesulitan itu tidak pernah mengurangi keyakinannya bahwa masa depan keluarga dapat dibangun dari tanah tersebut.

Tanaman pertama yang dikembangkan adalah nanas. Dia memilih komoditas tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang cukup baik.

Namun nanas membutuhkan waktu sekitar dua tahun sebelum dapat dipanen. Sambil menunggu, dia menanam jagung sebagai sumber pendapatan jangka pendek. Pada musim pertama dia menggunakan delapan kilogram benih, kemudian meningkat menjadi dua puluh kilogram pada musim berikutnya.



Kebun Nanas Pak Robinson Simanjuntak

Namun nanas membutuhkan waktu sekitar dua tahun sebelum dapat dipanen. Sambil menunggu, dia menanam jagung sebagai sumber pendapatan jangka pendek. Pada musim pertama dia menggunakan delapan kilogram benih, kemudian meningkat menjadi dua puluh kilogram pada musim berikutnya.

Harapan itu ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Dua musim tanam berturut-turut mengalami kegagalan. Modal sebesar Rp3 juta hingga Rp4 juta habis tanpa menghasilkan keuntungan. Bagi petani kecil, kegagalan seperti itu bisa menjadi pukulan berat. Namun Pak Putra memilih bangkit. Dia mengevaluasi kembali pola tanam dan kondisi lahannya. Dari proses belajar itu, dia memutuskan menanam kacang panjang yang memiliki masa panen lebih cepat.

Keputusan tersebut menjadi titik balik. Dengan menerapkan pola tanam bertahap, panen dapat dilakukan hampir setiap minggu. Hasilnya mulai memberikan pemasukan rutin bagi keluarga. Kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dan ketergantungan pada hasil kemenyan semakin berkurang.

Di saat yang sama, kebun nanas terus berkembang. Sejak pertengahan 2022, dia telah menanam sekitar 7.000 batang nanas di lahan seluas 1,5 hektare. Saat ini tanaman tersebut telah berproduksi dan dapat



Kebun Nanas Pak Robinson Simanjuntak

dipanen setiap dua minggu sekali. Kombinasi tanaman jangka pendek dan jangka panjang membuat pendapatan keluarga menjadi lebih stabil serta mengurangi risiko usaha tani.

Dari Tanah Napa ke Bangku Kuliah

Kerja keras selama beberapa tahun terakhir mulai membuahkan hasil. Dari lahan yang dikelolanya, Pak Putra memperkirakan nilai produksi yang diperoleh mencapai sekitar Rp80 juta hingga Rp120 juta dalam tiga tahun terakhir. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan adat, kesehatan keluarga, hingga pengembangan usaha tani.

Namun ada satu pencapaian yang paling membanggakan baginya. Hasil dari Tanah Napa kini mampu membiayai pendidikan anak pertamanya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Medan.



Mulai dari biaya pendaftaran, uang kuliah, tempat tinggal, hingga kebutuhan sehari-hari berasal dari hasil pertanian yang dikelola keluarga.

Bagi Pak Putra, keberhasilan menyekolahkan anak melalui hasil pertanian adalah bukti nyata bahwa tanah dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Pengalaman mengelola Tanah Napa membuat Pak Putra semakin yakin bahwa petani dapat hidup sejahtera apabila memiliki akses yang aman terhadap tanah dan kebebasan untuk mengelolanya. Tanah tidak hanya menghasilkan pangan dan pendapatan. Tanah juga melahirkan rasa aman, kemandirian, dan martabat.

Karena itu, perjuangan mempertahankan Tanah Napa bukan semata-mata perjuangan mempertahankan aset ekonomi. Ini adalah perjuangan menjaga ruang hidup, mempertahankan identitas komunitas, dan memastikan generasi mendatang masih memiliki tempat untuk bertani, bekerja, dan membangun masa depan.

“Saya percaya bahwa selama petani tetap bersatu, menjaga tanahnya, dan terus mengelolanya secara produktif, harapan akan selalu ada. Dari tanah inilah saya berdiri, hidup, dan melanjutkan perjuangan agar generasi berikutnya tetap memiliki tanah, identitas, dan martabat sebagai petani,” tutup Pak Putra. Bagi Pak Putra, Tanah Napa bukan sekadar warisan masa lalu. Tanah itu adalah jembatan menuju masa depan.

Sonari Manang Daong Salelengna (Sekarang atau Tidak Sama Sekali): Ancaman Krisis Iklim Terhadap Perempuan

Oleh: **Yenji Tampubolon**

Perubahan iklim kini mengubah banyak aspek kehidupan petani, terutama perempuan. Cuaca yang makin sulit diprediksi menghadirkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat pedesaan. Kekeringan, banjir, perubahan musim tanam, hingga menurunnya hasil pertanian menjadi kenyataan yang makin sering dihadapi. Krisis iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam.

Dalam situasi tersebut, perempuan berada di garis depan. Mereka terlibat langsung dalam pengelolaan pangan rumah tangga, pertanian keluarga, pengolahan hasil panen, hingga menjaga keberlanjutan sumber pangan sehari-hari. Ketika musim tanam berubah, hasil panen menurun, atau harga pangan melonjak, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya sekaligus mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Di tengah krisis iklim, kehidupan petani dipenuhi ketidakpastian. Banyak petani mengalami gagal tanam, keterlambatan panen, hingga penurunan produktivitas. Karena itu, perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak, tetapi juga aktor penting dalam membangun sistem pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Jika menengok ke belakang, keberadaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) turut memperparah kerentanan masyarakat. Alih fungsi lahan menjadi kawasan hutan tanaman industri telah mempersempit ruang kelola masyarakat, termasuk perempuan, terhadap sumber-sumber pangan lokal. Berkurangnya akses terhadap lahan pertanian, sumber air, dan hasil hutan berdampak langsung pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.



PEREMPUAN NATINGGIR MEMPERSIAPKAN ACARA MAKAN BERSAMA

Bagi perempuan, situasi tersebut menghadirkan beban yang berlipat. Mereka harus memastikan ketersediaan pangan keluarga di tengah makin terbatasnya sumber penghidupan. Ketika harga pangan meningkat dan pendapatan rumah tangga menurun, tekanan ekonomi makin besar dirasakan oleh perempuan sebagai pengelola kebutuhan keluarga sehari-hari.

Dalam perspektif kedaulatan pangan, persoalannya bukan semata-mata tentang tersedianya pangan, melainkan tentang hak masyarakat untuk menguasai, mengelola, dan menentukan sistem pangan mereka sendiri. Di sinilah pentingnya memastikan akses perempuan terhadap tanah, air, benih lokal, dan sumber daya alam lainnya. Ketika akses tersebut hilang atau dibatasi, kemampuan perempuan dalam menjaga kedaulatan pangan keluarga dan komunitas pun ikut melemah.

Selama beroperasi, PT TPL tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis yang tampak di permukaan, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan mikro yang sering luput dari perhatian publik. Berkurangnya sumber penghidupan, meningkatnya beban kerja domestik, hingga tekanan ekonomi dalam rumah tangga

merupakan sebagian kecil dari dampak yang banyak dirasakan perempuan.

Ketika pendapatan keluarga menurun dan kebutuhan hidup makin sulit dipenuhi, perempuan kerap menghadapi beban ganda. Selain mengurus rumah tangga, mereka juga dituntut mencari sumber pendapatan tambahan demi mempertahankan keberlangsungan keluarga. Karena itu, penguatan kapasitas perempuan melalui pendidikan, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting dalam menghadapi krisis iklim sekaligus membangun ketahanan pangan yang berkeadilan.



IBU-IBU KT SUBUR TANI MEMANEN BAWANG DI DESA SITIO-TIO
DOKUMENTASI KSPPM

Di tengah berbagai tantangan tersebut, perempuan tidak tinggal diam. Mereka terus mencari jalan keluar dan membangun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Salah satu pendekatan yang mulai berkembang adalah pertanian agroekologi.

Agroekologi merupakan praktik pertanian yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Pendekatan ini menekankan pemeliharaan kesuburan tanah, perlindungan sumber air, pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu prinsip utama agroekologi adalah keberagaman tanaman (biodiversity), yang terbukti mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan iklim.

Berbeda dengan pertanian yang berorientasi pada produksi semata, agroekologi menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan utama. Melalui pendekatan ini, hubungan antara manusia dan alam dibangun secara lebih harmonis. Tanah menjadi lebih sehat, sumber air lebih terjaga, keanekaragaman hayati meningkat, dan petani memiliki kontrol yang lebih besar terhadap proses produksi pangan mereka.

Praktik tersebut kini mulai dijalankan oleh kelompok-kelompok perempuan di berbagai desa. Mereka menanam beragam tanaman pangan dan kebutuhan.



dapur di lahan sekitar rumah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga. Di Kelompok Tani Ina Tangguh, misalnya, setiap keluarga mulai membudidayakan bawang merah, cabai, serta berbagai jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, anggota kelompok juga menanam jagung dan ubi sebagai alternatif pangan ketika produksi padi mengalami penurunan.

Pasca pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL, kelompok-kelompok perempuan memandang keputusan tersebut sebagai momentum penting untuk memulihkan ruang hidup, sumber penghidupan, dan kedaulatan pangan yang selama ini mereka perjuangkan. Bagi mereka, pencabutan izin bukan sekadar keputusan administratif, melainkan kesempatan untuk mengembalikan akses masyarakat terhadap tanah, sumber air, dan kawasan hutan yang menjadi penopang kehidupan.

Mereka menyampaikan harapan itu dalam ungkapan sederhana namun penuh makna:

“Saonari manang daong salelengna!” — sekarang atau tidak sama sekali.

Ungkapan tersebut bukan sekadar slogan. Dia adalah seruan untuk segera memulai pemulihan ekologis dan sosial yang telah lama tertunda. Sebab, krisis iklim telah melahirkan kesadaran baru di tengah masyarakat desa tentang pentingnya membangun sistem pertanian yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.

Dari pengalaman tersebut, kita belajar bahwa petani desa bukan hanya korban dari krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Mereka juga merupakan pelaku utama yang terus mencari cara untuk beradaptasi, mempertahankan ketahanan pangan komunitas, serta memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka.

Di tengah segala keterbatasan, perempuan menunjukkan bahwa harapan selalu dapat tumbuh dari tanah yang dirawat dengan kesabaran dan keberanian. Karena itu, perjuangan menuju kedaulatan pangan sejatinya adalah perjuangan untuk memulihkan hubungan manusia dengan alam, sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi model pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat.



CABAI SEBAGAI KOMODITAS UTAMA UNTUK EKONOMI KELUARGA
DOKUMENTASI KSPPM

Alam Tidak Bisa Berbohong: Tragedi Ekologis Sumatera Menjadi Bukti

Oleh: **Yacob Napitupulu**



AKIBAT BENCANA EKOLOGIS DI ADIAN KOTING, TAPANULI UTARA
DOKUMENTASI KSPPM

Masih jelas dalam ingatan masyarakat Sumatera Utara bagaimana dahsyatnya bencana ekologis yang melanda wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan Kota Sibolga dan sekitarnya pada akhir tahun 2025. Gelondongan kayu, lumpur, dan bebatuan menghantam permukiman warga, terbawa deras arus Sungai yang meluap. Peristiwa tersebut bukan sekadar bencana biasa, melainkan peringatan keras tentang rusaknya keseimbangan ekologis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat.

Secara kasatmata, besarnya volume material yang terbawa banjir menunjukkan berkurangnya fungsi hutan sebagai kawasan penyangga air. Investigasi pascabencana yang dilakukan KSPPM menemukan bahwa sejumlah hutan yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung dan daerah resapan air telah berubah menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri

Perubahan fungsi kawasan tersebut diduga menjadi salah satu faktor penting yang memperparah bencana ekologis di wilayah Tapanuli Utara, Tengah, Selatan, Sibolga dan sekitarnya.

Di kawasan HTI, jenis tanaman yang dominan ditanam adalah eukaliptus dalam pola monokultur. Berbeda dengan hutan alam yang memiliki keanekaragaman vegetasi dan sistem perakaran yang kompleks, hutan monokultur cenderung mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Siklus penanaman dan pemanenan yang terus berlangsung juga mengubah karakter tanah dan memengaruhi kestabilan tata air di sepanjang wilayah konsesi.

Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana orientasi industrialisasi yang bertumpu pada akumulasi keuntungan sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan. Perubahan kawasan lindung menjadi areal produksi tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Curah hujan yang tinggi sesungguhnya bukanlah masalah apabila ditopang oleh kondisi hutan yang mampu menyerap dan menyimpan air secara optimal. Namun ketika hutan berubah menjadi hamparan tanaman monokultur, kemampuan alam dalam mengendalikan aliran air ikut menurun. Karena itu, sulit untuk memisahkan bencana ekologis yang terjadi dari persoalan perubahan fungsi hutan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Perlawanan Rakyat yang Panjang



DEMONSTRASI DI DEPAN KANTOR GUBERNUR SUMUT
DOKUMENTASI KSPPM

Jauh sebelum bencana ekologis terjadi, masyarakat adat, petani, organisasi masyarakat sipil, dan gereja-gereja di kawasan Danau Toba telah menyuarakan berbagai kritik terhadap operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sepanjang tahun 2025, konsolidasi gerakan rakyat makin masif dilakukan dengan tuntutan utama: menutup operasional PT TPL dan memulihkan ruang hidup masyarakat.

Puncak konsolidasi tersebut terlihat melalui berbagai aksi massa, termasuk demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatra Utara yang mendesak pemerintah pusat mencabut izin operasional perusahaan. Namun sesungguhnya, kemarahan rakyat terhadap TPL bukanlah akumulasi dari beberapa tahun terakhir semata.

Penolakan terhadap perusahaan ini telah berlangsung sejak era PT Inti Indorayon Utama. Pergantian nama menjadi PT Toba Pulp Lestari tidak serta-merta

menghapus berbagai persoalan yang diwariskan sebelumnya. Konflik agraria, sengketa tanah adat, serta berbagai persoalan lingkungan terus muncul di berbagai sektor konsesi perusahaan. Karena itu, pencabutan izin TPL merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Pasca Pencabutan Izin PBBH TPL

Pada Januari 2026, pemerintah Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

PT Toba Pulp Lestari. Keputusan tersebut diambil setelah berbagai evaluasi, termasuk mempertimbangkan dampak bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara.

Bagi masyarakat adat, petani, dan seluruh elemen gerakan rakyat yang selama ini memperjuangkan penutupan TPL, keputusan tersebut menjadi momentum penting. Pencabutan izin bukan hanya kemenangan administratif, melainkan

pengakuan bahwa suara rakyat yang selama ini diperjuangkan tidak sia-sia.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja panjang berbagai elemen gerakan. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, organisasi masyarakat sipil, serikat tani, komunitas masyarakat adat, hingga gereja-gereja di Sumatra Utara telah memainkan peran penting dalam membangun solidaritas dan kesadaran bersama mengenai pentingnya keadilan ekologis.

Kemenangan yang Harus Dijaga

Bagi banyak pejuang rakyat, pencabutan izin TPL bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pekerjaan besar berikutnya. Maringan Panjaitan, Ketua Serikat Tani Toba, berharap pencabutan izin tersebut menjadi langkah awal untuk menata kembali tanah-tanah masyarakat adat yang selama ini berada dalam penguasaan perusahaan. Menurutnya, makin banyak petani yang memperoleh akses terhadap tanah, makin besar pula peluang terciptanya kesejahteraan di pedesaan.

Sementara itu, Benget Sibuea dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL mengingatkan agar keputusan pemerintah tidak berhenti sebagai janji politik semata. Baginya, masyarakat perlu terus mengawal proses pascapencabutan izin agar pengalaman masa lalu tidak kembali terulang.

Senada dengan itu, Arnot Manurung, Ketua Kelompok Tani Pangula Saor Dame Sibisa, menilai bahwa peran gereja dan masyarakat sipil dalam perjuangan ini patut diapresiasi. Namun dia menegaskan bahwa kemenangan sejati baru akan terwujud apabila masyarakat mampu mengelola kembali tanah yang

diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, bencana ekologis yang terjadi menjadi pengingat bahwa alam selalu memiliki cara untuk berbicara. Ketika hutan kehilangan fungsinya, sungai kehilangan keseimbangannya, dan ruang hidup masyarakat makin terancam, sesungguhnya alam sedang menyampaikan pesan yang tidak boleh diabaikan. Suara alam adalah suara kehidupan itu sendiri. Dan bagi banyak orang, suara alam juga merupakan suara Tuhan yang mengingatkan manusia agar kembali hidup selaras dengan ciptaan-Nya.



ALIANSI DERAS
TUTUP TPL
TUTUP TPL!
KEMBALIKAN
TANAH
ADAT
#BonaPasogitTanoAdat

ALIANSI DERAS
TUTUP TPL
Hentikan
Kriminalisasi
terhadap
Masyarakat
Adat

ALIANSI DERAS
TUTUP TPL
go to
HENTIKAN

5 Tuntutan MA

Perlawanan yang Dihasilkan Konflik Berkepanjangan

1. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat/petani
2. Lindungi konflik-konflik agraria
3. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat/petani
4. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat/petani
5. Laksanakan Reforma Agraria Sejati (UUPA 1960)

Malam Kemenangan, Awal Perjuangan Baru

Oleh: Bona Tua Purba

Malam itu terasa berbeda bagi Anggiat Sinaga. Udara dingin menyelimuti perkampungan di tepian Danau Toba. Di atas meja sederhana, segelas tuak aren berdiri setengah penuh. Rasanya mungkin tidak jauh berbeda dari biasanya. Namun malam itu, tuak terasa lebih nikmat, lebih hangat, lebih sempurna.

Bukan karena kualitas tuaknya. Bukan pula karena teman minum yang lebih ramai. Melainkan karena sebuah kabar yang selama bertahun-tahun hanya hidup sebagai harapan: izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dicabut.

Anggiat memandangi layar telepon genggamnya berulang kali. Berita itu telah dibaca berkali-kali, tetapi rasa haru yang muncul tidak juga berkurang. "Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil," katanya pelan.

Bagi sebagian orang, pencabutan izin TPL mungkin hanya sebuah keputusan administratif. Namun bagi Anggiat dan ribuan masyarakat yang selama puluhan tahun berada di garis depan perlawanan, keputusan itu adalah akumulasi dari keringat, air mata, ancaman, dan keyakinan yang tidak pernah padam.

Sejak November 2023, Anggiat dipercaya menjadi Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL. Sebelum terjun ke gerakan rakyat, dia dikenal sebagai komisioner Bawaslu. Namun jalan hidup membawanya ke medan perjuangan yang berbeda.

Ia mendatangi berbagai daerah di kawasan Danau Toba, memimpin aksi, mengkonsolidasikan masyarakat, serta mendesak pemerintah daerah untuk mengambil sikap terhadap perusahaan bubur kertas yang selama bertahun-tahun menjadi sumber konflik sosial dan lingkungan.



ANGGIAT SINAGA DI
DOKUMENTASI KSPPM

Perjalanan itu tidak mudah. Cibiran, tuduhan, hingga berbagai bentuk intimidasi menjadi bagian dari kesehariannya. Beberapa kali dia mendapat pendekatan yang bertujuan menjauhkannya dari gerakan perlawanan. Ada yang mengundangnya makan malam, ada yang memanfaatkan hubungan kekerabatan, bahkan ada transfer uang yang datang tanpa diminta.

Namun semuanya ditolak. "Uang tidak bisa membeli ideologiku," katanya tegas. Di tengah berbagai tekanan itu, Anggiat tidak berjalan sendiri. Dia berdiri bersama masyarakat adat, petani, tokoh agama, mahasiswa, organisasi lingkungan, dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang selama ini menuntut keadilan bagi Tanah Batak.

Karena itu, kemenangan ini bukan milik satu orang atau satu organisasi. Ini adalah kemenangan kolektif. Kemenangan yang lahir dari perjuangan panjang banyak pihak. Namun bagi Anggiat, pencabutan izin TPL bukanlah garis akhir. Justru sebaliknya.

Dia melihat keputusan tersebut sebagai pintu masuk menuju pekerjaan yang jauh lebih besar: pemulihan lingkungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat.

Menurutnya, negara tidak boleh berhenti pada pencabutan izin semata. Kawasan eks konsesi harus ditata ulang dengan mengutamakan pemulihan ekologis dan kepentingan masyarakat. Wilayah adat yang selama ini menjadi sumber konflik harus diakui dan dikembalikan kepada pemiliknya.

"Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sejarah, dan masa depan masyarakat adat," ujarnya.

Perhatian Anggiat juga tertuju pada kondisi lingkungan yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan. Sungai-sungai yang mengering, mata air yang berkurang, dan rusaknya habitat satwa liar harus menjadi bagian dari agenda pemulihan.

Baginya, pemulihan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pemegang izin atau menghadirkan perusahaan baru. Pemulihan harus mengembalikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

Karena itu, dia mengajak masyarakat adat untuk tidak terlena oleh euforia kemenangan. Penutupan TPL bukan berarti perjuangan selesai. Justru saat inilah babak baru dimulai. Babak untuk memperkuat organisasi rakyat. Babak untuk mengelola tanah adat secara mandiri. Babak untuk memastikan ruang hidup masyarakat tidak kembali dikuasai oleh kepentingan yang mengabaikan lingkungan dan hak-hak rakyat.

Ketika malam makin larut, gelas tuak di hadapannya perlahan kosong. Dalam benaknya berkelebat wajah-wajah masyarakat adat yang bertahan menjaga tanah leluhur, para petani yang kehilangan sumber air, para aktivis yang keluar masuk kampung, serta berbagai ancaman yang pernah datang silih berganti. Dia tahu kemenangan yang dirayakan malam itu bukanlah hadiah yang jatuh dari langit.

Kemenangan itu lahir dari ketekunan orang-orang yang menolak menyerah. Dari keyakinan bahwa tanah, hutan, dan air harus diwariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Karena itu, bagi Anggiat Sinaga, pencabutan izin TPL bukanlah akhir cerita. Dia adalah awal dari babak baru. Babak tentang pemulihan. Babak tentang pengembalian hak. Babak tentang membangun kembali hubungan manusia dengan tanahnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, masyarakat Danau Toba akan mengenang malam pencabutan izin TPL sebagai malam ketika masa depan mulai ditulis ulang.



ANGGIAT SINAGA MENEGASKAN GERAKAN MASYARAKAT YANG TIDAK BOLEH MATI

Tanah Leluhur, Tempat Kami Hidup

Oleh: Angela Manihuruk



ROBERT SIMAMORA

“Kami hanya ingin hidup tenang di tanah kami sendiri. Tanah ini akan kami wariskan kepada anak cucu kami, agar mereka juga dapat hidup dan menjaga tanah ini di masa depan.” Ungkap Robert Simamora, Ketua Komunitas Masyarakat Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora.

Bagi Komunitas Masyarakat Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora di Desa Aek Lung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah ruang hidup, identitas, sejarah, dan warisan leluhur yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan.

Komunitas yang saat ini terdiri dari 45 kepala keluarga tersebut memiliki wilayah adat seluas kurang lebih 150 hektare yang dikenal dengan nama *Tombak Sitakkubak*. Wilayah ini telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun selama sekitar 250 tahun, dimulai sejak masa Ompung Raja Medang Simamora yang pertama kali bermukim di Aek Laklak, dekat Batu Najagar.

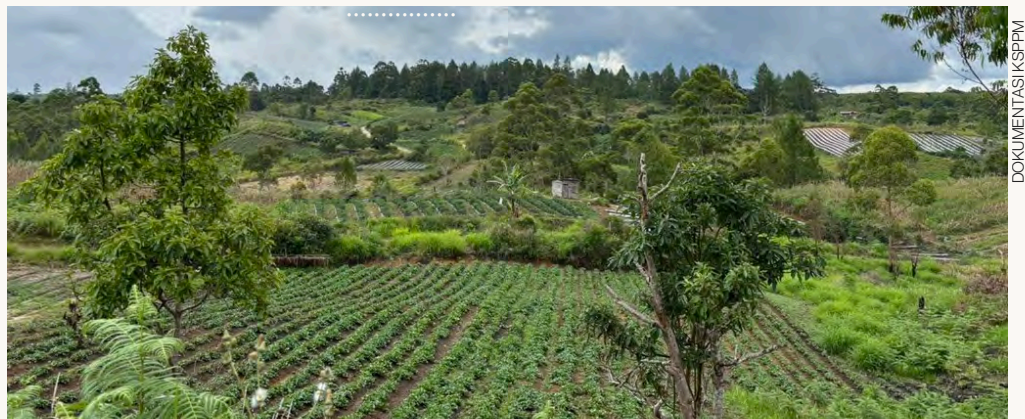
Dari wilayah awal tersebut, keturunannya kemudian membuka perkampungan baru di Huta Tinggi Golat dan mengelola *Tombak Sitakkubak* sebagai lahan pertanian, kawasan penggembalaan ternak, sekaligus tempat pemakaman leluhur. Sejak dahulu, tanah ini menghasilkan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari padi, kopi, jeruk, hingga kemenyan.

Jejak sejarah penguasaan wilayah itu masih dapat ditemukan hingga kini. Situs perkampungan lama, parik (benteng tanah), patung batu menyerupai manusia, hingga makam para leluhur menjadi bukti kuat keterikatan masyarakat dengan tanah tersebut. Karena itu, bagi keturunan Ama Raja Medang Simamora, kehilangan tanah berarti kehilangan bagian penting dari jati diri mereka.

Konflik atas *Tombak Sitakkubak* mulai muncul pada tahun 1975. Saat itu, wilayah adat masyarakat dijadikan areal penghijauan dan reboisasi daerah aliran sungai. Masyarakat menerima program tersebut karena ada kesepahaman bahwa status kepemilikan tanah tetap berada di tangan Masyarakat Adat.

Namun harapan itu berubah menjadi persoalan ketika tanaman pinus hasil penghijauan dipanen pada tahun 1994. Setelah panen, wilayah tersebut justru ditanami eukaliptus oleh PT Inti Indorayon Utama (PT IJU), yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), tanpa persetujuan masyarakat.

Sejak awal masyarakat menolak kehadiran perusahaan di wilayah adat mereka. Akan tetapi, perusahaan mengklaim area tersebut sebagai bagian



LAHAN TOMBAK SITAKKUBAK, WILAYAH ADAT YANG DIPERJUANGKAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT KETURUNAN AMA RAJA MEDANG SIMAMORA-AEK LUNG

dari konsesinya berdasarkan izin yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang selama berabad-abad menjadi sumber kehidupan mereka.

Tidak hanya kehilangan akses, masyarakat juga menghadapi berbagai bentuk tekanan ketika berusaha mempertahankan wilayahnya. Intimidasi, kriminalisasi, hingga berbagai tindakan yang menghambat pengelolaan tanah adat menjadi bagian dari perjalanan panjang perjuangan mereka.

Dua Dekade Perjuangan Mempertahankan Wilayah Adat

Memasuki tahun 2005, masyarakat kembali mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak atas tanah adat mereka. Perjuangan tersebut makin terarah setelah pada tahun 2009 mereka bertemu dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan mulai melakukan berbagai upaya advokasi.

Masyarakat menyusun kembali sejarah penguasaan wilayah yang selama ini diwariskan melalui tradisi lisan (*marturi-turian*), melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, serta memperkuat bukti-bukti sejarah dan administrasi yang mendukung klaim mereka.

Di saat yang sama, mereka juga melakukan penguasaan dan pengelolaan wilayah secara nyata. Setiap keluarga yang terlibat dalam perjuangan memperoleh lahan pengelolaan sekitar satu hingga dua hektare. Lahan-lahan tersebut kemudian ditanami

berbagai komoditas seperti kopi, cabai, bunga kol, padi darat, tomat, alpukat, jagung, dan tanaman pangan lainnya.

Selain memperkuat pengelolaan wilayah, masyarakat juga menempuh berbagai jalur advokasi. Mereka melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kementerian Kehutanan, Dewan Kehutanan Nasional, Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan. Berbagai aksi dan demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pengakuan negara melalui penetapan wilayah adat dan hutan adat.

Perjalanan tersebut tidaklah mudah. Dalam prosesnya, masyarakat menghadapi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari perusakan tanaman, penyemprotan racun terhadap tanaman pangan, pembakaran gubuk, konflik horizontal, hingga intimidasi yang melibatkan aparat keamanan.

Nai (ibu) Desi Purba, salah seorang pengurus komunitas, mengenang bagaimana masyarakat membangun strategi perjuangan secara kolektif. Sebagian pengurus fokus melakukan advokasi ke tingkat daerah dan nasional, sementara yang lain memperkuat konsolidasi internal serta mendorong anggota komunitas untuk terus mengelola wilayah adat yang diperjuangkan.

Strategi itu membuahkan hasil. Setelah lebih dari dua dekade berjuang, masyarakat berhasil menguasai kembali sekitar 148 hektare dari total wilayah adat yang mereka perjuangkan.



ANGGOTA KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT SEDANG PANEN CABAI

DOKUMENTASI KSPPM

Menurut Robert Simamora, pada tahun 2020-an wilayah *Tombak* Sitakkubak ditetapkan sebagai tanah stanpas oleh pemerintah karena konflik agraria yang berkepanjangan antara Masyarakat Adat dan PT TPL. Sejak saat itu, perusahaan tidak lagi memasuki atau mengganggu wilayah yang diperjuangkan masyarakat.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kembali mengelola tanah secara penuh. Berbagai tanaman pangan dan hortikultura berkembang di lahan yang sebelumnya menjadi arena konflik.

Kini hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari tanah itulah mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak-anak, memperbaiki rumah, hingga menabung untuk masa depan.

“Tanah ini adalah milik opung kami. Dari hasil tanah inilah kami bisa hidup, menyekolahkan anak, dan bertahan sampai hari ini” ujar Robert Simamora.

Saat ini masyarakat tengah menikmati panen kopi, cabai, dan bunga kol. Dalam satu kali panen, bunga kol dapat menghasilkan hingga dua ton dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram. Tanaman tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan hingga panen.



Sementara itu, harga kopi mencapai sekitar Rp65.000 per kilogram. Komoditas alpukat juga memberikan hasil yang menjanjikan, dengan panen hampir 400 kilogram yang dijual sekitar Rp4.500 per kilogram.

Bagi masyarakat, angka-angka tersebut bukan sekadar nilai ekonomi. Hasil panen itu adalah bukti bahwa tanah adat yang dikelola secara mandiri mampu menjadi sumber kesejahteraan tanpa harus diserahkan kepada perusahaan.

Harapan Pasca Pencabutan Izin PBPH TPL

Pada 26 Januari 2026, Kementerian Kehutanan mencabut izin Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari. Kabar tersebut disambut dengan sukacita oleh berbagai komunitas Masyarakat Adat yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak atas wilayahnya.

Bagi Komunitas Masyarakat Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora, pencabutan izin tersebut menjadi momentum penting. Namun, kebahagiaan itu juga disertai pertanyaan besar mengenai kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka perjuangkan.

Masyarakat tidak ingin pengalaman masa lalu terulang kembali, seperti ketika pergantian PT IJU menjadi PT TPL tidak mengubah konflik yang mereka hadapi. Karena itu, mereka meminta pemerintah segera memberikan kepastian hukum melalui pengakuan dan penetapan wilayah adat, serta melepaskan wilayah tersebut dari kawasan kehutanan yang selama ini menjadi sumber sengketa.

Bagi mereka, legalitas bukan sekadar dokumen administratif. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman untuk mengelola tanah tanpa ancaman kriminalisasi dan konflik pada masa depan. Lebih dari itu, pengakuan tersebut menjadi jaminan bahwa tanah leluhur dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Menutup kisah perjuangannya, Robert Simamora mengajak komunitas Masyarakat Adat lain yang sedang berjuang mempertahankan wilayahnya agar terus mengelola tanah sebagai bentuk klaim nyata atas hak mereka.

Baginya, pengalaman *Tombak* Sitakkubak menunjukkan satu pelajaran penting: ketika masyarakat memiliki ruang untuk mengelola tanah leluhurnya sendiri, mereka mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat. Tanah leluhur bukan hanya tentang masa lalu. Dia adalah fondasi masa depan yang sedang diperjuangkan agar tetap hidup di tangan anak cucu mereka.

“Hagiot”: Nilai yang Menghidupi Perjuangan Rakyat Angkola

Oleh: Johannes Tamba

DOKUMENTASI KSPPM



RUMAH PEMBIBITAN PEJUANG AGRARIA MASYARAKAT BATANG TURA JULU

Di Batang Tura Julu, Kecamatan Sipirok, terdapat banyak hal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi hidup dan diwariskan melalui percakapan sehari-hari masyarakat. Salah satunya adalah kata *hagiot*. Dalam bahasa Angkola, kata ini sering dimaknai sebagai inisiatif, kemauan untuk bergerak, atau kesediaan mengambil bagian dalam urusan bersama. Namun bagi masyarakat Angkola, *hagiot* lebih dari sekadar kata; ia merupakan nilai hidup yang menuntun cara mereka memandang diri, komunitas, dan masa depan kampung halaman.

Selama berada di tengah masyarakat Batang Tura Julu, saya hampir selalu mendengar kata *hagiot* dalam berbagai percakapan. Kata ini muncul ketika masyarakat membahas persoalan kampung, tanah, pertanian, hingga perjuangan pasca pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL). Diucapkan secara sederhana, tetapi mengandung makna sosial yang mendalam.

Dalam pemahaman masyarakat, seseorang yang memiliki *hagiot* adalah orang yang tidak tinggal diam ketika menghadapi persoalan bersama. Dia bersedia terlibat, mengambil tanggung jawab, dan menjadi

bagian dari solusi. Pemahaman tersebut tampak dalam salah satu pertemuan wiritan yang saya ikuti. Seorang ibu berkata:

“Ima hita on unang ma songon na so marhagiot. Molo dang hita na manggerakkon, ise muse?”

(Janganlah kita menjadi orang yang tidak punya inisiatif. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi?)

Kalimat itu muncul ketika masyarakat membicarakan masa depan tanah mereka setelah pencabutan izin TPL. Menariknya, ruang seperti wiritan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat warga berdiskusi mengenai persoalan kampung, kehidupan sehari-hari, dan masa depan generasi mereka.



KONSOLIDASI MASYARAKAT BATANG TURA JULU PASCA TUTUP TPL

Di ruang-ruang seperti itulah agama, budaya, dan perjuangan sosial bertemu. Masyarakat tidak memisahkan kehidupan spiritual dari persoalan tanah dan penghidupan. Semua dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dari pengalaman lapangan tersebut, saya melihat bahwa perjuangan masyarakat tidak berdiri terpisah dari nilai budaya yang mereka anut. Cara mereka berbicara, bermusyawarah, dan mengambil keputusan selalu berakar pada nilai-nilai yang hidup di dalam komunitas. Karena itu, bahasa menjadi penting untuk dibaca dalam perspektif etnografi.

Sebagian lainnya khawatir dianggap melanggar hukum ketika mengelola lahan yang telah lama menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Namun, di tengah situasi tersebut, masyarakat perlahan membangun keberanian untuk bergerak bersama.

Dalam sebuah percakapan santai di warung, seorang warga yang telah lama tinggal di Batang Tura Julu berkata: *“Molo adong hagiote ni dongatta, dang porlu hita mabiar.”* (Kalau masih ada kemauan dan inisiatif dari kawan-kawan kita, kita tidak perlu terus hidup dalam ketakutan.)



DOKUMENTASIKSPPM



DOKUMENTASIKSPPM

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cara masyarakat memahami dunia dan memberi makna pada pengalaman hidup mereka. Antropolog Clifford Geertz menyebut kebudayaan sebagai jaringan makna yang ditunen dan dihidupi oleh manusia. Dalam konteks ini, *hagiote* dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan makna tersebut. Da mencerminkan cara masyarakat Angkola memahami tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kehidupan bersama.

Nilai *hagiote* menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi konflik agraria yang berlangsung bertahun-tahun. Selama masa konsesi TPL, banyak warga hidup dalam ketidakpastian. Sebagian merasa takut memasuki tanah yang mereka yakini sebagai miliknya sendiri.

Pernyataan sederhana itu menggambarkan cara masyarakat memaknai perjuangan. Bagi mereka, perjuangan tidak selalu hadir dalam bentuk aksi besar atau perlawanan terbuka. Perjuangan juga hidup dalam upaya menjaga semangat kebersamaan, saling menguatkan, dan memastikan bahwa masyarakat tidak menyerah pada keadaan.

Di sinilah *hagiote* menemukan makna sosialnya yang paling dalam. Dia bukan sekadar kualitas individu, melainkan kesadaran kolektif yang membuat komunitas tetap bertahan di tengah berbagai tekanan.

Dari perspektif etnografi, hal ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat sering kali lahir bukan dari teori-teori besar, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari.

la tumbuh dari percakapan di teras rumah, diskusi di warung kopi, pertemuan wiritan, dan kebiasaan masyarakat untuk berkumpul serta bermusyawarah.

Pasca pencabutan izin TPL, harapan masyarakat mulai tumbuh kembali. Mereka berharap pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan semata, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Banyak warga menginginkan legalitas yang jelas agar mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.

Selain itu, masyarakat berharap adanya program pemberdayaan ekonomi yang nyata. Mereka menginginkan dukungan berupa pelatihan pertanian, bantuan bibit dan modal, penguatan kelompok tani, serta akses pasar yang lebih baik bagi hasil-hasil pertanian mereka.

Namun, di tengah berbagai harapan tersebut, masyarakat tetap percaya bahwa perubahan tidak akan datang hanya dari pemerintah atau pihak luar.

Perubahan juga harus lahir dari kemauan masyarakat sendiri untuk terus bergerak dan bergotong royong. Karena itu, *hagiot* tetap menjadi nilai yang relevan dan penting.

Pada akhirnya, perjuangan rakyat Angkola tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik agraria semata. Dia juga merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kata *hagiot*, masyarakat menunjukkan bahwa perjuangan bukan hanya soal mempertahankan tanah, melainkan juga menjaga nilai, ingatan, dan martabat kebersamaan.

Karena itu, ketika masyarakat Batang Tura Julu terus bergerak hari ini, mereka sesungguhnya tidak hanya sedang memperjuangkan hak atas tanah. Mereka sedang merawat sebuah nilai yang telah lama menjadi fondasi kehidupan bersama: keyakinan bahwa perubahan hanya mungkin terjadi ketika masyarakat memiliki *hagiot*—kemauan untuk peduli, bergerak, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bersama.



KOMUNITAS MASYARAKAT ANGKOLA
DOKUMENTASI KSPPM

Kisah Masyarakat Angkola Melawan TPL

Oleh: Hilarius Sihombing

Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan masyarakat di Sumatra Utara. Keputusan tersebut tidak lahir begitu saja. Dia merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat yang selama puluhan tahun menghadapi dampak sosial, ekologis, dan kemanusiaan akibat operasional perusahaan.

Di berbagai wilayah konsesi TPL, mulai dari Tele, Aek Nauli, Aek Raja, Habinsaran hingga Sektor Sidempuan, masyarakat berulang kali menyuarkan penolakan. Mereka menyaksikan bagaimana hutan alam berubah menjadi hamparan monokultur eukaliptus, sumber air mengering, lahan pertanian rusak, dan ruang hidup masyarakat makin terdesak.

Di Tapanuli Selatan, perjuangan itu menemukan bentuknya dalam keberanian masyarakat Angkola yang memilih bertahan dan melawan. Di tengah intimidasi, kekerasan, dan ancaman kriminalisasi, muncul sosok-sosok yang berdiri di garis depan membela hak masyarakat. Di antara mereka adalah Sinar Juwita Pohan dari Batang Tura Julu dan Pardamean Pulungan dari Sanggapati.

Kisah mereka bukan sekadar cerita tentang konflik dengan sebuah perusahaan, melainkan kisah tentang keberanian rakyat mempertahankan ruang hidupnya.

Perempuan Berdiri di Garis Depan

Bagi Sinar Juwita Pohan, perjuangan melawan TPL berawal dari keresahan yang dirasakan masyarakat Batang Tura Julu ketika perusahaan mulai menebangi pohon karet, sawit, alpukat, dan durian milik warga pada tahun 2024.

Penebangan tersebut bukan hanya menghilangkan tanaman. Bagi masyarakat, pohon-pohon itu adalah sumber penghidupan, tabungan keluarga, dan

warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Melihat kerusakan yang semakin meluas, masyarakat mulai melakukan aksi protes. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah menutup jalan sebagai upaya mendesak pemerintah mendengarkan suara masyarakat Angkola Timur dan Sipirok yang terdampak langsung oleh operasional TPL.

Dari proses perjuangan itu lahir komunitas MACAN (Mamak-Mamak Cantik), sebuah kelompok perempuan yang beranggotakan sekitar 200 orang. Komunitas ini menjadi wadah bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam perjuangan mempertahankan ruang hidup.

Bersama masyarakat, mereka mendirikan posko perjuangan di Dusun Payah Sisubut. Posko tersebut dibangun secara gotong royong dan swadaya, sekaligus berfungsi sebagai dapur umum dan pusat konsolidasi masyarakat.

Perempuan-perempuan yang tergabung dalam MACAN secara bergiliran menjaga posko setiap hari untuk memastikan perusahaan tidak kembali beroperasi di wilayah mereka. Namun perjuangan itu tidak berjalan mudah. Pada tahun 2025, posko tersebut dibakar oleh pihak yang diduga berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Peristiwa itu tidak membuat masyarakat mundur. Mereka kembali membangun posko secara gotong royong dan melanjutkan perjuangan.



POSKO PERJUANGAN DI DUSUN PAYAH SISUBUT
DOKUMENTASI KSPPM

Dalam sebuah pertemuan mediasi yang difasilitasi pemerintah desa, pihak perusahaan meminta izin untuk memanen eukaliptus di wilayah Payah Sisubut. Saat itulah Sinar Juwita Pohan menyampaikan sikap tegas masyarakat. **“Selama konflik ini belum diselesaikan, PT TPL tidak boleh beroperasi,”** tegasnya.

Setelah menyampaikan sikap tersebut, dia bersama anggota MACAN memilih meninggalkan forum. Keberanian Sinar menjadi makin berarti karena dia juga menghadapi tekanan dari lingkungan sosialnya sendiri. Budaya patriarki yang masih kuat sering kali menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan langkahnya.

Baginya, perjuangan ini sangat personal. Lahan seluas 2,3 hektare yang dimilikinya di Payah Sisubut turut terdampak aktivitas perusahaan. Pohon karet, kemiri, dan petai yang menjadi sumber penghidupan keluarganya hilang. Lebih dari itu, dia menyaksikan penderitaan warga lain yang kehilangan tanah, sumber pendapatan, dan rasa aman. Karena itulah dia memilih terus bersuara.



**AMANG MENGIKUTI SEMINAR KOLABORATIF
DI KANTOR PUSAT GKPA**

DOKUMENTASI KSPPM

Kriminalisasi Tidak Menghentikan Perlawanan

Perlawanan masyarakat terus berlanjut. Ketika masyarakat melakukan aksi penutupan jalan di Desa Aek Situmba untuk menghalangi akses perusahaan menuju Batang Tura Julu, tekanan terhadap warga makin meningkat. Sinar Juwita bersama delapan warga lainnya kemudian dipanggil oleh kepolisian dalam proses klarifikasi terkait kebakaran tanaman eukaliptus milik TPL.

Dalam pemeriksaan tersebut, Sinar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Di luar ruang pemeriksaan, masyarakat dan anggota MACAN memberikan dukungan dengan menggelar aksi solidaritas. Meski menghadapi intimidasi dan ancaman, Sinar tetap memilih bertahan. Baginya, ketakutan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.

Perlawanan dari Sanggapati

Jika Sinar Juwita menjadi simbol perlawanan perempuan Angkola, maka Pardamean Pulungan menjadi salah satu wajah perjuangan masyarakat Sanggapati. Konflik di Desa Sanggapati mulai memuncak pada tahun 2023 ketika TPL melakukan penebangan pohon karet dan sawit milik masyarakat di hamparan lahan sekitar 300 hektare.

Masyarakat khawatir aktivitas tersebut akan memperburuk kondisi lingkungan dan mengancam sumber penghidupan mereka. Pardamean Pulungan termasuk warga yang paling vokal menyuarakan penolakan. Dia secara terbuka meminta perusahaan menghentikan operasionalnya karena dikhawatirkan menyebabkan kekeringan pada persawahan dan lahan pertanian warga. Alih-alih menghentikan kegiatan, perusahaan justru menambah alat berat dan personel keamanan. Situasi itu memicu konflik yang makin luas.

Kaum ibu turun langsung menghadang alat berat. Kaum bapak melakukan penjagaan dan konsolidasi. Masyarakat berusaha menghentikan penebangan dengan berbagai cara. Ketika perusahaan mengklaim memiliki izin, Pardamean mempertanyakan batas dan dasar hukum operasional perusahaan di wilayah mereka.

Namun pertanyaan tersebut tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Konflik terus berlanjut. Pada tahun 2024, masyarakat melakukan aksi tanam diri sebagai bentuk protes atas penebangan yang terus berlangsung. Sekitar seratus warga terlibat dalam aksi tersebut. Bagi masyarakat,

aksi tanam diri merupakan simbol bahwa hukum dan keadilan telah gagal melindungi mereka.



SINAR JUWITA POHON MENCERITAKAN PERJUANGAN AMANG
DOKUMENTASI KSPPM

Dari Kriminalisasi Menuju Organisasi Rakyat

Perlawanan masyarakat tidak berhenti pada aksi lapangan. Warga kemudian membangun portal di sejumlah titik untuk membatasi akses kendaraan perusahaan. Akibatnya, beberapa warga, termasuk Pardamean Pulungan, dilaporkan ke kepolisian dan menjalani proses pemeriksaan. Kriminalisasi tersebut tidak menghentikan perjuangan.

Sebaliknya, pengalaman menghadapi tekanan justru memperkuat kesadaran masyarakat untuk membangun organisasi yang lebih kuat. Pada akhir tahun 2025, lahirlah Aliansi Masyarakat Angkola (AMANG) sebagai wadah perjuangan masyarakat Angkola.

Pardamean Pulungan dipercaya menjadi salah satu pemimpin organisasi tersebut karena rekam jejaknya dalam mendampingi dan

memperjuangkan hak masyarakat. Bersama AMANG, masyarakat terus mengawal agenda pasca pencabutan izin TPL.

Setelah TPL Ditutup

Bagi masyarakat Angkola, pencabutan izin TPL bukanlah akhir perjuangan. Dia justru menjadi awal dari perjuangan baru. Masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan, tetapi juga memastikan adanya pemulihan lingkungan, pengakuan hak atas tanah, dan perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini terdampak.

Mereka berharap tanah-tanah bekas konsesi dapat dikembalikan kepada masyarakat. Mereka juga berharap negara memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, masyarakat menginginkan agar pengalaman kriminalisasi terhadap pembela HAM tidak kembali terulang. Sebab membela lingkungan hidup dan mempertahankan ruang hidup bukanlah tindakan kriminal. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.

Perjuangan Sinar Juwita Pohan dan Pardamean Pulungan menunjukkan bahwa perubahan tidak lahir dari keberanian individu semata, tetapi dari kekuatan masyarakat yang bersedia berdiri bersama menghadapi ketidakadilan.



DOKUMENTASI KSPPM

PARDAMEAN PULUNGAN MEMBERIKAN MINUM KEPADA MACAM SAAT PERTEMUAN DI DESA SANGGAPATI

Kemenangan yang Mesti Dikawal: Perjuangan Belum Selesai di Tanah Adat

Oleh: Lambok Lumban Gaol

"Kami tidak mau menjadi budak di tanah kami sendiri. Lebih baik mati berjuang daripada hidup tanpa harga diri. Kami tidak mau anak cucu kami kehilangan identitas."

Kalimat itu berulang kali disampaikan Rusmedia Lumban Gaol, yang akrab disapa Op. Putra, dalam berbagai pertemuan dan aksi perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Bagi mereka, mempertahankan tanah adat bukan sekadar mempertahankan sebidang lahan, melainkan mempertahankan martabat, identitas, dan masa depan generasi berikutnya.

Meski demikian, masyarakat adat tidak pernah kehilangan keyakinan. Mereka percaya bahwa mempertahankan tanah leluhur adalah panggilan hidup yang tidak dapat ditawar. Melawan ketidakadilan adalah bagian dari tanggung jawab mereka kepada para leluhur dan anak cucu yang akan mewarisi tanah tersebut.

Perjuangan itu menuntut pengorbanan yang tidak sedikit. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya pribadi harus mereka keluarkan. Tidak jarang mereka meninggalkan keluarga selama sehari-hari untuk mengikuti aksi, rapat, dan advokasi hingga ke ibu kota



KELOMPOK INA MANADUMA DARI PANDUMAAN-SIPITUHUTA
DOKUMENTASI KSPPM

Ketika perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta mulai menggema ke berbagai daerah, banyak pihak menaruh harapan. Namun jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Di hadapan mereka berdiri PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan besar yang selama bertahun-tahun dianggap sulit disentuh. Status perusahaan sebagai Objek Vital Nasional sering kali membuat masyarakat merasa berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari kemampuan mereka.

negara. Semua dilakukan dengan satu tujuan: memastikan tanah adat tetap menjadi ruang hidup masyarakat adat.

Mengingat kembali perjalanan panjang tersebut, banyak di antara mereka yang tidak mampu menahan air mata. Betapa menyakitkan ketika masyarakat yang telah hidup turun-temurun di tanahnya sendiri justru harus membuktikan keberadaannya di hadapan negara. Mereka yang menjaga hutan dan tanah

warisan leluhur selama berabad-abad justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hak atas wilayahnya sendiri.

Harapan yang selama ini diperjuangkan akhirnya menemukan titik terang pada 26 Januari 2026. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari di Sumatra Utara.

Bagi banyak masyarakat adat, keputusan tersebut menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan. Rumentu mengisahkan bahwa ketika mendengar kabar pencabutan izin itu, air matanya langsung mengalir. Ia bersyukur kepada Tuhan karena perjuangan yang dijalani selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Namun di balik rasa syukur itu, tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh.

Peristiwa penyerangan terhadap komunitas Natinggir pada Agustus 2025 masih membekas dalam ingatan. Saat itu, masyarakat menghadapi kekerasan yang melibatkan pihak perusahaan, BHL, dan sebagian warga dari Desa Simare. Hujan batu, perusakan rumah dan sepeda motor, serta ancaman terhadap anak-anak sekolah dasar menjadi pengalaman pahit yang sulit dilupakan.

Meski demikian, masyarakat memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari sejarah perjuangan. Mereka ingin generasi berikutnya

mengetahui bahwa hak tidak pernah datang dengan sendirinya. Hak harus diperjuangkan, dipertahankan, dan diwariskan.

Bagi mereka, perjuangan ini bukan soal memperoleh kekuasaan atau keuntungan ekonomi. Ini adalah perjuangan mempertahankan harga diri. **"Kami adalah pejuang, bukan penjilat,"** demikian salah satu ungkapan yang sering terdengar dalam berbagai pertemuan masyarakat adat.

Kini harapan terbesar mereka adalah pengakuan resmi dari negara. Masyarakat adat berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mengakui keberadaan mereka beserta wilayah adat yang selama ini mereka jaga. Pengakuan tersebut penting agar masyarakat dapat mengelola, melindungi, dan mewariskan wilayah adatnya secara aman kepada generasi berikutnya.

Mereka percaya bahwa mempertahankan tanah leluhur adalah panggilan hidup yang tidak dapat ditawar. Melawan ketidakadilan adalah bagian dari tanggung jawab mereka kepada para leluhur dan anak cucu yang akan mewarisi tanah tersebut.

Perjuangan itu menuntut pengorbanan yang tidak sedikit. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya pribadi harus mereka keluarkan. Tidak jarang mereka meninggalkan keluarga selama berhari-hari untuk mengikuti aksi, rapat, dan advokasi hingga ke ibu kota negara. Semua dilakukan dengan satu tujuan:



KUNJUNGAN PASTORAL KE KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT NATINGGIR PASCA PERISTIWA PENYERANGAN DARI PT TPL
DOKUMENTASI KSPPM

TPL Tutup, Lalu Siapa Menanggung Kerusakan Hutan?

Oleh: Susi Halawa

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) resmi dicabut oleh pemerintah pusat pada 26 Januari 2026 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026. Pencabutan izin tersebut merupakan sanksi atas keterlibatan PT TPL dalam bencana ekologis yang melanda Sumatera Utara pada 25 November 2025 serta konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat di Tano Batak selama puluhan tahun. Kebijakan ini sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 20 Januari 2026, bersama pencabutan izin terhadap 27 perusahaan lain yang dinilai merusak lingkungan.

Keputusan ini menjadi salah satu jawaban perjuangan panjang rakyat selama kurang lebih empat dekade melawan perusahaan yang merusak lingkungan dan meminggirkan hak asasi manusia di kawasan Danau Toba.

Namun, bertolak melihat masa lalu, saat PT TPL masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) dan Presiden B.J Habibie mengeluarkan keputusan

menghentikan sementara operasionalnya pada 1999-2002¹, pengalaman tersebut semestinya menjadi penunjuk arah bagi masyarakat sipil untuk tidak berhenti pada sanksi administratif yang terkesan “ringan”.

Pencabutan eks-konsesi Indorayon tanpa sanksi pemulihan lingkungan telah menempatkan warga Samosir menjadi pihak yang harus menanggung biaya ekonomi dan sosial yang mahal akibat kerusakan ekologi yang ditinggalkan perusahaan.

Setelah meraup keuntungan besar dari eksploitasi hutan, perusahaan justru lepas dari tanggung jawab atas krisis yang diwariskannya kepada warga hingga kini. Ironinya, negara seakan tutup mata.

Pengabaian Pemulihan Lingkungan: Siapa Menikmati, Siapa Menanggung Derita?

Belajar dari Samosir—terutama di pulau—hengkangnya PT IIU sejak 2003, tidak pernah benar-benar diikuti oleh tindakan pemulihan lingkungan, baik oleh pihak perusahaan maupun negara.



KUBANGAN BEKAS GALIAN ALAT BERAT MENJADI SUMBER AIR DI TENGAH KEKERINGAN BERKEPANJANGAN

DOKUMENTASIKSPM

¹ Lihat Dimpos Manalu, “Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik” Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009) hlm. 239.

Eks-konsesi malah diubah fungsinya menjadi kawasan Hutan Lindung. Namun, perubahan fungsi tersebut sama sekali tidak disertai dengan upaya pemulihan atas kondisi lingkungan yang sedang sakit. Bahkan fungsi kawasan tersebut menjadi persoalan baru bagi masyarakat adat, atas klaim “kawasan hutan negara”.

Akibatnya, masyarakat dan alam dibiarkan menanggung sendiri dampak kerusakan lingkungan ulah dari perusahaan. Tanaman monokultur Eucalyptus dibiarkan tumbuh, menjulang kokoh hingga hari ini. Pohon yang dikenal rakus air ini menjadi malapetaka bagi warga menghadapi krisis air berkepanjangan di Pulau Samosir.

Becermin dari masa lalu, Henrika Sitanggang, Ketua Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS), mengaku pesimis terhadap keseriusan pemerintah pasca-tutup TPL. Menurutnya, penghentian operasi perusahaan tidak akan berarti apa-apa tanpa agenda pemulihan yang nyata.

“Belajar dari sejarah, meskipun Indorayon sudah hengkang sejak tahun 2003 dari Pulau Samosir, namun jejaknya masih ada saat ini. Lingkungan tidak menjadi lebih baik, karena Eucalyptus yang masih tumbuh berdiri. Penutupan Indorayon menjadi tidak ada artinya, tidak ada bedanya, karena tidak ada upaya pemulihan lingkungan dari perusahaan atau pemerintah,” ujarnya.

Krisis air kini menjadi wajah paling nyata dari kerusakan ekologis di Pulau Samosir. Pulau yang berada di tengah Danau Toba ini justru menjadi wilayah yang sangat miskin air. Bahkan mematikan sumber pencaharian petani. Selain penghasil kopi, dahulu masyarakat di pulau juga penghasil gabah padi, bahkan kebutuhan rumah, dan biaya sekolah anak berasal dari hasil menjual gabah.

“Saat masih berumur 18 tahun, sekitar tahun 2000, saya masih bisa melihat bapakku panen sawah dua kali dalam setahun. Air berkelimpahan. Dulu ada irigasi hasil swadaya dan gotong royong warga untuk mengairi persawahan. Dulu ada parit air yang dibangun warga. Benar-benar parit, bukan selokan. Parit ini mengairi dari Salaon Dolok sampai ke Salaon Toba. Namun sejak 2010, air semakin menipis dan hilang dari tahun ke tahun. Di Salaon, warga sudah tidak bersawah lagi,” jelasnya.

Penuturan serupa datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Edison Pasaribu, dalam peringatan Hari Bumi di SMAN 1 Sitio pada 24 April 2026. Dia menyebut, sekitar 13.000 ha khususnya di Pulau, masih ditumbuhi oleh Eucalyptus. Dia berharap pohon monokultur tersebut bisa digantikan dengan vegetasi pohon yang beragam, supaya air di pulau kembali berkelimpahan.

“Di Samosir, khususnya di dalam pulau, ada sebanyak 13.000 ha masih ditumbuhi Eucalyptus. Maunya itu ditebang semua dan diganti dengan segala macam pohon, supaya air di pulau kembali berkelimpahan seperti dulu,” harapnya.

Pernyataan dari pihak Pemkab tersebut menegaskan adanya pengakuan bahwa dominasi tanaman monokultur tersebut telah merusak keseimbangan ekosistem, mempercepat degradasi lingkungan, dan berkontribusi terhadap terjadinya kekeringan ekstrem.

Tidak saja untuk kebutuhan pengairan pertanian, kebutuhan air untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga pun sangat susah, terutama wilayah di dataran tinggi. Persoalan krisis air seakan sudah menjadi agenda tahunan di Pulau Samosir. Warganya pun mau tidak mau harus beradaptasi dengan krisis yang menimpa. Untuk bertahan, mereka biasanya akan membeli air minum dengan harga Rp.100.000 – 150.000 per balteng yang berisi 1000 liter air untuk kebutuhan rumah, yang hanya bertahan sekitar dua minggu. Anak-anak juga harus menyusuri hutan yang jauh dari permukiman untuk mendapatkan air bersih. Lebih jauh, kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas menjadi korban paling terdampak atas krisis air.



ANAK-ANAK MENEMPUH PERJALANAN 30 MENIT KE DALAM HUTAN UNTUK MENDAPATKAN AIR BERSIH

Jika tidak memungkinkan, maka warga akan menggunakan air tampungan hujan dari kubangan galian alat berat, yang biasa mereka sebut “Pea”. Mereka menggunakannya untuk mencuci piring dan pakaian, mandi, bahkan jadi tempat renang anak-anak. Tak jarang pula kubangan yang sama digunakan oleh kerbau untuk minum dan berendam. Manusia dan kerbau seolah bersaing untuk bertahan hidup dari krisis.²

Tidak hanya krisis air. Rusaknya ekosistem tidak hanya menambah kerugian Henrika sebagai petani, tetapi juga menghancurkan ruang hidup satwa liar dari habitat alaminya.

“Monyet dan babi hutan masuk ke ladang-ladang pertanian warga, yang akhirnya memaksa warga untuk menjaganya siang dan malam. Kalau tidak, maka ubi dan jagung yang sedang berbuah akan habis dimakan mereka. Harusnya ekosistem dikembalikan seperti dulu lagi, dihutankan kembali, dibuat jadi rumah yang layak bagi makhluk hidup. Eucalyptus bukan rumah bagi monyet dan babi hutan karena tidak ada sumber makanan,” tambahnya.

Di tengah kerusakan yang diwariskan kepada masyarakat sampai hari ini, Indorayon justru menikmati keuntungan besar sejak awal beroperasi melalui eksploitasi hutan di Sumatra Utara. Bahkan sebelum pabrik berjalan penuh selama dua tahun, perusahaan telah mencatat laba produksi hingga ratusan miliar rupiah: Rp10,79 miliar pada 1988, meningkat menjadi Rp33,09 miliar pada 1989, dan melonjak menjadi Rp102,17 miliar pada 1990 (naik 207 persen).

Keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan kayu alam dan monopoli perdagangan pinus di wilayah Sumatra Utara melalui berbagai kebijakan pemerintah.³ **Pertama:** pada 1984, Menteri Kehutanan memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 150.00 ha kepada Indorayon melalui SK 203/Kpts-IV/84, pada 23 Oktober 1984. Dengan izin tersebut, perusahaan bebas menebangi hutan alam melalui sistem tebang pilih. Namun kewajiban menanam

kembali kawasan yang ditebang tidak pernah benar-benar dipastikan pelaksanaannya.

Kedua: pada tahun yang sama, Menteri Kehutanan, Soedjarwo, menerbitkan Surat Keputusan No. 236/Kpts-IV/84 tertanggal 19 November 1984, memberikan hak pemanfaatan kayu hutan tanaman pinus merkusi milik negara di Provinsi Sumatera Utara sekitar 86.000 ha. Keputusan ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Indorayon.

Ketiga: keuntungan Indorayon makin deras ketika Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Ir A.S.M Pandjaitan, mengeluarkan surat edaran pada 4 Mei 1988 kepada yang melarang industri kayu lain membeli pinus rakyat. Praktis, hanya Indorayon yang dibenarkan membeli pinus rakyat, sementara perusahaan lain membeli kembali melalui Indorayon.

Bisa dibayangkan, Indorayon tinggal melenggang bebas memanen dan menjual hasil eksploitasi hutan yang dibayar mahal dengan kerusakan hutan yang parah. Keuntungan tersebut didapatkan Indorayon sebelum pabrik beroperasi. Artinya, modal Indorayon untuk membangun pabrik terindikasi berasal dari hasil penjualan pinus dan kayu alam dari hutan Sumatra Utara.

Alih-alih menuntut perusahaan memulihkan kerusakan hutan, pemerintah malah memperluas konsesinya melalui hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 269.060 ha dengan persebaran di enam kabupaten: Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Dairi, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Ir. Hasjrul Harahap, N0. 493/Kpts-II/1992 tertanggal 1 Juni 1992.

Sejak saat itu, bentang hutan alam diubah menjadi hamparan Eucalyptus monokultur dalam skala masif. Perubahan lanskap tersebut kemudian menyeret kawasan Tapanuli Raya ke dalam krisis ekologis berkepanjangan selama empat dekade terakhir—dari era Indorayon hingga berganti nama menjadi TPL.

²Lihat Tulisan Website KSPPM, “Mauas di Toru Sampuran: Ketika Petani Kekurangan Air dan Gagal Panen”, 2025, <https://ksppm.org/2025/08/13/mauas-di-toru-sampuran/>.

³ Manalu, Op.cit., hlm 103 & 121; Koalisi Indonesia Memantau, “The Devil is in the Detail: Aroma Patgulipat Izin Toba Pulp Lestari” (Jakarta: 2023), hlm. 7.

Dampaknya tidak lagi sekadar kerusakan lingkungan, melainkan rangkaian bencana yang terus berulang: longsor, banjir, pencemaran sungai, hingga kekeringan ekstrem. Bencana itu telah merenggut puluhan nyawa, menghancurkan rumah warga, mematikan ternak, merusak lahan pertanian dan persawahan, serta menghancurkan kendaraan dan alat produksi milik masyarakat. Fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, dermaga, jalan, saluran air, bahkan area pemakaman pun turut rusak diterjang bencana.⁴

DOKUMENTASI KSPPM



SEORANG LANSIA SEDANG SIBUK MENCUCI PAKAIAN; AIR YANG SAMA DIGUNAKAN ANAK-ANAK UNTUK BERMAIN DAN BERENANG

Akankah Negara Mau Belajar Dari Samosir?

Khusus di Pulau Samosir, warisan kerusakan itu masih terasa hingga hari ini dalam bentuk krisis air yang ekstrem. Sementara pada masa operasinya, perusahaan terus meraup keuntungan besar dari eksploitasi kawasan hutan Tapanuli Raya. Bahkan setelah dicabut izinnya, perusahaan tidak kunjung dimintai dan dibebani pertanggung jawaban pemulihan lingkungan, masyarakat justru dipaksa menanggung seluruh ongkos ekologis dan sosial yang ditinggalkan.

Eksplorasi hutan menunjukkan bagaimana negara lebih berperan sebagai fasilitator akumulasi modal bagi perusahaan dibanding pelindung hidup masyarakat. Lagi-lagi, rakyat diposisikan sebagai anak tiri. Berbagai izin konsesi, monopoli sumber daya, hingga pembiaran terhadap kerusakan lingkungan memperlihatkan keberpihakan kebijakan kepada kepentingan modal. Sementara rakyat diposisikan

sebagai pihak yang menanggung seluruh biaya sosial dan lingkungan.

Pada satu sisi, perusahaan menikmati keuntungan ratusan miliar dari eksploitasi hutan, kayu alam, dan pinus. Namun di sisi lain, petani kehilangan sawah, akses air bersih, sumber penghidupan, bahkan satwa kehilangan rumah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dipusatkan pada segelintir elite korporasi dan birokrasi, sementara kerugian didistribusikan kepada masyarakat adat, petani kecil, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan kata lain, yang terjadi bukan hanya perampasan ruang hidup, tetapi juga pemindahan beban krisis kepada kelas-kelas sosial paling lemah. Sejarah Indorayon telah menunjukkan bahwa pencabutan izin tanpa pemulihan hanyalah perpindahan beban dari perusahaan kepada rakyat. Jika negara sungguh ingin berpihak pada keselamatan lingkungan dan masyarakat adat, maka eks-konsesi TPL tidak boleh dibiarkan menjadi Samosir yang kedua. Sebab kemenangan sejati bukan ketika perusahaan berhenti beroperasi, melainkan ketika hutan dipulihkan, hak masyarakat adat dikembalikan, dan rakyat tidak lagi mewarisi derita dari kerusakan yang mereka tidak pernah ciptakan.



ANAK-ANAK DAN LANSIA TERLIHAT SEDANG MENCUCI PIRING DAN PAKAIAN DARI AIR YANG KERUH
DOKUMENTASI KSPPM

⁴ Dokumen KSPPM Parapat, Rekam Jejak Kehadiran PT Inti Indorayon Utama (IIU) – PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak (1983-2025), Desember 2025.



Siapa yang Menguasai Tanah?

Adat Menjawab Ketimpangan?

Refleksi Kritis atas Pengakuan Masyarakat Adat dan Masa Depan Reforma Agraria

Oleh: Roki Pasaribu

Tiga belas tahun telah berlalu sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Putusan tersebut sering disebut sebagai tonggak sejarah perjuangan masyarakat adat di Indonesia karena untuk pertama kalinya negara mengakui bahwa wilayah adat bukanlah objek yang dapat secara sepihak diklaim sebagai kawasan hutan negara.

Namun, jika melihat capaian pengakuan hingga hari ini, optimisme itu tampaknya perlu disertai dengan refleksi yang lebih kritis. Hingga kini, baru sekitar 174 komunitas adat yang memperoleh pengakuan hutan adat dengan luas sekitar 368.877 hektare. Angka tersebut tampak kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan kenyataan bahwa sebagian besar komunitas di Nusantara memiliki akar sejarah sebagai masyarakat adat.¹

Di Sumatra Utara, situasinya tidak jauh berbeda. Dari 33 kabupaten/kota, baru sebagian kecil yang memiliki peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Jumlah komunitas yang telah memperoleh pengakuan resmi juga masih sangat terbatas. Sementara itu, konflik agraria terus berlangsung. Masyarakat adat masih berhadapan dengan perusahaan kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta klaim kawasan hutan negara yang membatasi akses mereka terhadap tanah leluhur.

Lambatnya proses pengakuan sering dijelaskan sebagai akibat dari rumitnya prosedur administrasi dan minimnya kemauan politik pemerintah. Penjelasan tersebut tidak salah. Namun, setelah lebih dari satu dekade mendampingi dan mengamati

perjuangan masyarakat adat di Tano Batak, saya justru menemukan pertanyaan lain yang jarang dibicarakan:

Apa yang terjadi setelah masyarakat adat mendapatkan pengakuan?

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan paling mendasar dalam agenda reforma agraria.

Adat sebagai Strategi Perjuangan

Selama ini identitas adat terbukti menjadi alat politik yang sangat efektif. Ketika masyarakat berhadapan dengan negara atau korporasi, identitas adat mampu mengonsolidasikan solidaritas internal dan menarik dukungan eksternal. Melalui identitas adat, masyarakat dapat menjelaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar sengketa tanah, melainkan perjuangan mempertahankan sejarah, kebudayaan, dan keberlangsungan hidup.

Hal ini tampak jelas dalam perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan Nagasaribu. Selama bertahun-tahun mereka menggunakan identitas adat untuk membangun konsolidasi di tingkat kampung, menjalin hubungan dengan perantau, menggalang dukungan gereja, kampus, organisasi masyarakat sipil, hingga menarik perhatian media nasional maupun internasional.

Strategi tersebut terbukti berhasil. Dukungan terus mengalir. Penelitian dilakukan. Film dokumenter diproduksi. Diskusi akademik bermunculan. Nama mereka masuk ke ruang-ruang yang sebelumnya sulit dijangkau masyarakat pedesaan.

¹ <https://www.kehutan.go.id/pers/percepatan-penetapan-hutan-adat-capai-174-unit-pemerintah-perkuat-langkah-strategis-hingga-2029>

Bahkan di lapangan, identitas adat sering kali menjadi alat perlindungan yang efektif. Tidak jarang ketegangan dengan aparat keamanan perusahaan mereda ketika masyarakat berbicara menggunakan bahasa adat. Dalam konteks budaya Batak yang masih sangat menghormati adat istiadat, pendekatan tersebut memiliki daya tawar yang kuat.

Dengan kata lain, jika pertanyaannya adalah apakah adat efektif sebagai strategi perjuangan, maka jawabannya adalah ya. Adat terbukti mampu menjadi alat mobilisasi politik yang kuat untuk menghadapi kekuasaan negara maupun korporasi. Namun, persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika pengakuan telah diperoleh.

Dalam banyak diskusi mengenai masyarakat adat, terdapat asumsi yang jarang dipertanyakan. Asumsi tersebut berbunyi sederhana:

"Jika masyarakat adat sudah diakui, maka persoalan agraria akan selesai."

Di sinilah menurut saya letak persoalan utama.

Pengakuan masyarakat adat memang mampu menyelesaikan sebagian konflik, khususnya konflik antara masyarakat dengan negara atau perusahaan. Ketika wilayah adat diakui, maka dasar hukum yang selama ini digunakan untuk mengeklaim tanah masyarakat mulai kehilangan legitimasi.

Namun pengakuan tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah di dalam komunitas itu sendiri. Pengakuan menjawab pertanyaan tentang siapa pemilik wilayah, tetapi tidak selalu menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting:

Siapa yang menguasai tanah di dalam wilayah tersebut?

Adat dan Relasi Kuasa

Salah satu kecenderungan dalam gerakan masyarakat adat adalah melihat adat sebagai sesuatu yang harmonis, egaliter, dan bebas konflik. Padahal kenyataan sosial tidak sesederhana itu. Sebelum negara hadir dengan klaim kawasan hutannya, sebelum perusahaan masuk dengan konsesinya,

ketimpangan dalam masyarakat sebenarnya sudah ada.

Di banyak komunitas Batak, terdapat keluarga yang menguasai lahan lebih luas dibanding keluarga lainnya. Ada kelompok yang memiliki pengaruh sosial lebih besar. Ada elite kampung. Ada tokoh adat yang memiliki posisi lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Bahkan ada warga yang hampir tidak memiliki tanah sama sekali.

Masuknya negara dan perusahaan hanya memperparah ketimpangan tersebut. Namun mereka bukan satu-satunya sumber ketimpangan. Karena itu, ketika wilayah adat berhasil dikembalikan kepada komunitas, persoalan baru sering muncul: *Bagaimana tanah tersebut akan dikelola? Siapa yang berhak menentukan? Siapa yang memperoleh manfaat terbesar?*

Dalam studi-studi agraria, terdapat istilah yang dikenal sebagai *elite capture*. Konsep ini menjelaskan situasi ketika manfaat dari suatu kebijakan yang seharusnya dinikmati bersama justru lebih banyak dikuasai oleh kelompok elite lokal.

Apa yang saya amati di beberapa komunitas adat pasca pengakuan menunjukkan gejala yang serupa. Ketika perjuangan masih berlangsung, semua orang berbicara tentang persatuan. Ketika pengakuan sudah diperoleh, mulai muncul pertanyaan mengenai batas tanah, hak waris, pengelolaan hasil hutan, hingga klaim kepemilikan individu.

Pada titik ini, adat tidak lagi hanya menjadi alat perlawanan terhadap pihak luar. Adat juga mulai digunakan untuk melegitimasi klaim dan kepentingan internal. Adat yang sebelumnya menjadi alat pembebasan dapat berubah menjadi instrumen dominasi. Bukan karena adat itu buruk, melainkan karena adat tidak pernah berdiri di ruang yang steril dari relasi kuasa. Adat selalu hidup dalam masyarakat yang terus berubah.

Adat Tidak Pernah Bebas Nilai

Selama ini banyak orang membayangkan bahwa adat adalah warisan murni dari masa lalu. Padahal adat yang kita kenal hari ini telah mengalami interaksi

panjang dengan negara, agama, pasar, pendidikan modern, dan kapitalisme. Karena itu, adat bukanlah sistem yang statis. Ia berubah. Ia beradaptasi. Ia juga menyerap nilai-nilai baru. Ketika logika pasar masuk ke desa, maka semangat akumulasi juga ikut masuk ke dalam ruang adat.

Ketika tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perebutan atas tanah juga ikut memasuki ruang adat. Akibatnya, adat tidak selalu mampu secara otomatis menjamin keadilan sosial. Dalam beberapa situasi, adat justru digunakan untuk mempertahankan struktur ketimpangan yang sudah ada. Karena itu, menganggap adat sebagai mekanisme penyelesaian agraria yang sempurna merupakan romantisme yang perlu dikritik.

Pasca Pencabutan Izin TPL

Refleksi ini menjadi makin relevan setelah pencabutan izin PBPH PT Toba Pulp Lestari. Selama hampir empat dekade, perjuangan rakyat Batak berfokus pada satu tujuan besar: menghentikan operasi TPL. Hari ini tujuan tersebut telah tercapai. Namun justru di sinilah pekerjaan yang lebih berat dimulai.

Karena pencabutan izin TPL tidak otomatis membuat tanah eks konsesi kembali menjadi milik rakyat. Secara hukum, sebagian besar wilayah tersebut tetap berstatus kawasan hutan negara. Pertanyaan berikutnya adalah:

Jika suatu hari tanah-tanah eks konsesi tersebut berhasil dikembalikan kepada masyarakat, bagaimana mekanisme pengelolaannya?

Apakah tanah itu akan didistribusikan secara adil? Apakah petani tak bertanah akan memperoleh akses? Apakah perempuan akan memiliki hak yang setara? Apakah generasi muda akan mendapatkan ruang hidup yang layak? Ataukah tanah tersebut hanya akan berpindah dari monopoli perusahaan menuju monopoli kelompok tertentu di tingkat lokal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan pengakuan adat. Dia membutuhkan agenda yang lebih mendasar: reforma agraria.

Selama ini gerakan masyarakat adat banyak berfokus pada politik pengakuan. Fokus tersebut penting karena tanpa pengakuan, masyarakat adat terus berada dalam posisi rentan. Namun pengakuan seharusnya dipahami sebagai titik awal, bukan tujuan akhir.

Setelah pengakuan diperoleh, agenda berikutnya adalah memastikan bahwa sumber daya yang telah dikembalikan benar-benar dikelola secara demokratis dan adil. Tanpa itu, pengakuan hanya akan memindahkan pusat kekuasaan tanpa mengubah struktur ketimpangan. Karena itu, pertanyaan penting yang perlu mulai didiskusikan bukan lagi sekadar: "Bagaimana mendapatkan pengakuan masyarakat adat?" Melainkan:

"Bagaimana memastikan pengakuan tersebut menghasilkan keadilan agraria bagi seluruh anggota komunitas?"

Penutup

Pengakuan masyarakat adat merupakan capaian penting yang lahir dari perjuangan panjang melawan sejarah perampasan tanah oleh negara dan korporasi. Tidak ada alasan untuk meremehkan arti pentingnya. Namun pengakuan bukanlah akhir perjalanan.

Pengalaman berbagai komunitas menunjukkan bahwa setelah pengakuan diperoleh, persoalan baru justru mulai muncul. Konflik yang semula berada di luar komunitas perlahan bergeser ke dalam komunitas. Persoalan yang semula berkaitan dengan negara dan perusahaan berubah menjadi persoalan distribusi, akses, dan keadilan di antara sesama warga.

Karena itu, agenda pasca-pengakuan perlu dibicarakan secara lebih serius. Jika tidak, pengakuan hanya akan menjadi kemenangan simbolik yang gagal menjawab akar persoalan agraria. Pada akhirnya, tujuan perjuangan bukan sekadar mengembalikan tanah kepada masyarakat adat, melainkan memastikan bahwa tanah tersebut menjadi dasar bagi kehidupan yang lebih adil, setara, dan bermartabat bagi seluruh anggota komunitas. Sebab tanpa keadilan agraria di dalam komunitas itu sendiri, pengakuan hanya akan mengubah siapa yang menguasai tanah—bukan mengubah cara tanah itu dibagikan.

Setelah Izin TPL dicabut, Siapa Menguasai Tanah?

Oleh: Sandres Siahaan

Ketika konflik antara masyarakat Desa Sanggapati dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) memuncak pada 2023, banyak orang melihatnya sebagai kisah yang sudah akrab dalam konflik agraria di Indonesia. masyarakat desa melawan perusahaan besar. Dalam narasi yang sering muncul, masyarakat dipandang sebagai kelompok yang seragam—sama-sama kehilangan tanah, sama-sama menjadi korban, dan sama-sama memiliki kepentingan yang identik.

Pandangan semacam ini memang tidak sepenuhnya salah. Sejarah panjang konflik agraria di Indonesia menunjukkan bagaimana negara dan korporasi sering kali bekerja sama dalam menguasai tanah, hutan, dan sumber daya alam yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat. Namun, cara pandang tersebut sering kali menyederhanakan kenyataan sosial di pedesaan.

Di balik konflik antara masyarakat dan perusahaan, terdapat proses-proses lain yang berlangsung secara perlahan di dalam desa itu sendiri. Sebelum perusahaan datang, ketimpangan penguasaan tanah sering kali telah terbentuk. Sebagian warga berhasil mengumpulkan lahan dalam skala luas, sementara sebagian lainnya justru kehilangan tanah dan bergantung pada penjualan tenaga kerja untuk bertahan hidup.

Kasus Desa Sanggapati di Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa konflik agraria tidak selalu dapat dipahami semata-mata sebagai benturan antara masyarakat lokal dan kapital besar. Ia juga merupakan cerita tentang bagaimana kapitalisme perlahan mengubah hubungan sosial di pedesaan, melahirkan kelas-kelas sosial baru, dan menciptakan ketimpangan yang terus direproduksi bahkan setelah perusahaan besar pergi.

Dari Tanah Adat Menuju Pasar Tanah

Menurut ingatan kolektif masyarakat, tanah di

Sanggapati pada masa lalu dikelola dalam kerangka adat dan dipandang sebagai ruang hidup bersama. Tanah tidak semata-mata dipahami sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai sumber penghidupan yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Namun seiring waktu, sistem tersebut mengalami perubahan. Kepemilikan tanah makin bersifat individual dan perlahan masuk ke dalam logika pasar. Tanah tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang hidup, tetapi juga sebagai komoditas yang memiliki nilai jual.

Perubahan ini makin menguat sejak dekade 1980-an ketika masyarakat desa makin terhubung dengan ekonomi pasar. Kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Pendidikan, kesehatan, pangan, dan berbagai kebutuhan lain menuntut biaya yang makin besar. Di sisi lain, hasil pertanian tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam situasi seperti itu, banyak rumah tangga petani menghadapi tekanan yang berat. Ketika pendapatan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjual tanah menjadi salah satu pilihan yang tersedia. Bukan karena mereka ingin melepaskan tanah leluhur, melainkan karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup.

Karena itu, penjualan tanah di Sanggapati tidak bisa dipahami sebagai transaksi yang sepenuhnya bebas dan sukarela. Dalam banyak kasus, penjualan tanah merupakan konsekuensi dari himpitan ekonomi yang memaksa petani mengorbankan aset terpenting yang mereka miliki.

Menariknya, proses jual beli tanah berlangsung dalam kondisi legalitas yang sering kali tidak jelas. Banyak transaksi hanya menggunakan surat keterangan tanah, bukti pembayaran pajak, atau surat yang dikeluarkan pemerintah desa. Meski memiliki kekuatan hukum

yang terbatas, dokumen-dokumen tersebut tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya transaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tanah di pedesaan tidak selalu bergantung pada kepastian hukum formal. Selama ada pihak yang membutuhkan uang dan ada pihak yang memiliki modal, tanah tetap dapat berpindah tangan.

Di titik inilah proses komodifikasi tanah mulai bekerja. Tanah tidak lagi dipertahankan sebagai ruang hidup bersama, melainkan diperlakukan sebagai barang yang dapat dibeli dan dijual. Dari sinilah ketimpangan penguasaan tanah mulai berkembang secara lebih tajam.

Lahirnya Kelas Majikan dan Kelas Buruh

Perubahan status tanah menjadi komoditas melahirkan proses yang oleh banyak ilmuwan agraria disebut sebagai diferensiasi kelas pedesaan. Di Sanggapat, proses ini terlihat dengan sangat jelas. Sebagian kecil orang yang memiliki modal lebih besar mampu membeli dan mengumpulkan tanah dalam jumlah yang luas. Sebagian dari mereka bahkan berasal dari luar desa. Ada pemilik lahan yang menguasai hingga puluhan hektare tanah, yang kemudian dikembangkan menjadi perkebunan karet dan sawit berskala komersial.

Sementara itu, sebagian besar warga desa justru mengalami proses yang sebaliknya. Mereka kehilangan tanah sedikit demi sedikit hingga akhirnya tidak lagi memiliki alat produksi yang memadai untuk bertani secara mandiri. Akibatnya, mereka terpaksa menjual tenaga kerjanya kepada pemilik-pemilik lahan tersebut.

Berdasarkan keterangan masyarakat, sekitar 80 persen warga Sanggapat saat ini tidak lagi memiliki akses yang cukup terhadap tanah. Mereka menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai buruh tani di perkebunan karet dan sawit yang dimiliki oleh segelintir pemilik modal.

Dengan kata lain, struktur sosial pedesaan telah mengalami polarisasi. Pada satu sisi muncul kelompok pemilik lahan yang menguasai alat produksi dan memperoleh keuntungan dari hasil perkebunan.

Di sisi lain terdapat kelompok pekerja yang bergantung pada upah untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kapitalisme agraria di Sanggapat tidak lahir secara tiba-tiba ketika perusahaan besar datang. Ia telah tumbuh dari dalam masyarakat melalui proses komodifikasi tanah yang berlangsung selama puluhan tahun.

Ketika Kapital Besar Datang

Masuknya PT Toba Pulp Lestari ke wilayah Sanggapat tidak menciptakan ketimpangan dari nol. Sebaliknya, perusahaan masuk ke dalam struktur sosial yang sebelumnya sudah timpang. Ketika TPL mulai menebangi perkebunan karet dan sawit yang diklaim berada dalam wilayah konsesinya, konflik terbuka pun muncul.

Namun yang menarik, kelompok yang paling aktif melakukan perlawanan bukanlah para pemilik lahan besar. Justru buruh tani yang berada di garis depan menghadapi perusahaan dan aparat keamanan. Fenomena ini tampak paradoks. Mengapa mereka yang tidak memiliki tanah justru menjadi kelompok yang paling keras melawan?

Jawabannya terletak pada sumber penghidupan mereka. Bagi para buruh tani, perkebunan karet dan sawit merupakan satu-satunya ruang ekonomi yang masih memungkinkan mereka memperoleh upah. Ketika perkebunan tersebut ditebang dan diganti dengan tanaman Eucalyptus, mereka kehilangan kesempatan kerja yang selama ini menjadi sandaran hidup keluarga.

Berbeda dengan perkebunan rakyat yang masih menyerap banyak tenaga kerja, model produksi Eucalyptus relatif minim kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya, ekspansi TPL tidak hanya mengancam pemilik lahan, tetapi juga menghancurkan sumber nafkah ribuan pekerja pedesaan. Karena itu, perlawanan yang muncul tidak semata-mata merupakan perjuangan mempertahankan tanah. Bagi banyak buruh tani, perlawanan tersebut merupakan perjuangan mempertahankan syarat minimum untuk bertahan hidup.

Ironi Setelah Kemenangan

Ketika izin PBPH TPL dicabut pemerintah pada 2026, banyak pihak merayakannya sebagai kemenangan rakyat. Namun, pertanyaan penting kemudian muncul: kemenangan bagi siapa? Pengalaman di Sanggapatı menunjukkan bahwa mundurnya kapital besar tidak otomatis menghapus ketimpangan yang telah terbentuk sebelumnya. Struktur penguasaan tanah yang timpang tetap ada.

Bahkan dalam beberapa kasus, para pemilik modal lokal mulai kembali memperluas pengaruhnya dengan memanfaatkan momentum pasca-konflik. Berbagai skema kerja sama dan bagi hasil ditawarkan kepada masyarakat untuk membuka kembali lahan.

Sekilas, skema tersebut tampak sebagai bentuk redistribusi manfaat. Namun jika ditelusuri lebih jauh, hubungan produksi yang terbentuk tetap mempertahankan posisi masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja, sementara kontrol atas tanah tetap berada di tangan segelintir pihak. Artinya, meskipun aktor eksternal telah mundur, relasi ketimpangan masih terus direproduksi melalui mekanisme lokal.

Reforma Agraria atau Sekadar Pergantian Penguasa?

Kasus Sanggapatı mengajarkan bahwa persoalan agraria tidak dapat diselesaikan hanya dengan

mengusir perusahaan besar. Jika struktur penguasaan tanah di tingkat lokal tetap timpang, maka ketidakadilan akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Kapital besar mungkin pergi, tetapi ketimpangan tetap bertahan.

Karena itu, perjuangan agraria tidak boleh berhenti pada pencabutan izin konsesi atau pengusiran korporasi. Agenda yang lebih mendasar adalah memastikan terjadinya perubahan struktur penguasaan tanah yang memungkinkan petani memperoleh kembali akses yang adil terhadap alat produksinya.

Tanpa langkah tersebut, kemenangan atas perusahaan hanya akan menjadi pergantian aktor yang menguasai tanah, sementara mayoritas warga tetap berada pada posisi yang sama: menjadi pekerja di tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka.

Dalam konteks inilah reforma agraria menemukan relevansinya. Bukan sekadar soal pembagian tanah, melainkan upaya membangun kembali relasi sosial yang lebih adil di pedesaan. Sebab persoalan utama bukan hanya siapa yang menguasai tanah hari ini, tetapi siapa yang memperoleh manfaat dari tanah tersebut dan siapa yang terus-menerus tersingkir darinya.



SEJUMLAH WARGA DESA SANGGAPATI TAPSEL LAKUKAN AKSI TANAM DIRI SEBAGAI BENTUK PROTES PENGUSAKAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PT TPL

<https://desernews.com/heboh-warga-desa-sanggapatı-tapsel-gelar-aksi-tanam-diri-akibat-pengrusakan-kebun-oleh-tp/>

Harapan Petani di Samosir Pasca Penutupan TPL

Oleh: Lestina Sitanggang



Pemandangan Perjalanan ke Desa Buntu Mauli
DOKUMENTASI KSPPM

Sejak pertama kali berdiri dengan nama PT Inti Indorayon Utama, yang kemudian berganti menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan ini telah menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Penolakan tersebut bukanlah bentuk penolakan tanpa alasan, melainkan lahir dari pengalaman panjang masyarakat yang merasakan langsung dampak sosial dan ekologis dari keberadaan perusahaan.

Alih-alih menghadirkan kesejahteraan sebagaimana yang dijanjikan, kehadiran perusahaan justru memunculkan berbagai persoalan. Kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga kekerasan yang berulang kali terjadi menjadi bagian dari pengalaman hidup masyarakat di kawasan Tapanuli Raya. Ruang hidup yang sebelumnya aman dan menjadi sumber penghidupan perlahan berubah menjadi wilayah yang penuh ketidakpastian.

Karena itu, ketika Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 87 Tahun 2026 pada 26 Januari 2026 tentang pencabutan izin PT TPL, masyarakat menyambutnya dengan sukacita. Bagi

mereka, penutupan TPL bukan sekadar berhentinya operasional sebuah perusahaan. Lebih dari itu, penutupan tersebut dipandang sebagai peluang untuk memulihkan alam yang telah rusak dan mengembalikan sumber-sumber kehidupan masyarakat.

Kabar penutupan TPL tidak hanya disambut oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi. Berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, hingga jaringan solidaritas internasional turut menyambut keputusan tersebut sebagai sebuah kemenangan penting dalam perjuangan panjang masyarakat.

Namun, di balik rasa syukur itu, tersimpan pula sejumlah pertanyaan. Apa yang akan terjadi setelah TPL ditutup? Bagaimana nasib hutan bekas konsesi?

Apakah pemerintah akan sungguh-sungguh melakukan pemulihan lingkungan? Ataukah masyarakat kembali harus menghadapi ketidakpastian seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus muncul di tengah masyarakat.

Pada Jumat, 8 Mei 2026, saya mengunjungi Kelompok Tani Subur Tani di Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana ekologis yang oleh masyarakat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan selama puluhan tahun.

Setelah pertemuan kelompok selesai, saya berbincang dengan beberapa perempuan anggota kelompok tani. Kami berbicara tentang berbagai hal, termasuk penutupan TPL. Dalam percakapan itu, saya bertanya kepada mereka:

"TPL sudah tutup. Apa yang paling Inang harapkan setelah ini?" Nai Tiur, salah seorang anggota kelompok, menjawab dengan tegas. *"Semoga hutan di Samosir semakin pulih. Sekarang saja sudah terasa perbedaannya. Suhu tidak lagi seperti dulu. Kami berharap alam bisa kembali membaik."*

Jawaban tersebut kemudian disambung oleh Oppu. Oliv. *"Semoga pemerintah tidak bermain di belakang dengan orang-orang kaya itu. Kami berharap pemerintah benar-benar memulihkan hutan Samosir. Selama pohon Eucalyptus masih ada, selama itu pula masyarakat masih merasakan dampaknya. Waktu perayaan Hari Bumi di Sitio-tio, pemerintah bilang pohon Eucalyptus harus dimusnahkan. Kita lihat saja nanti bagaimana pelaksanaannya. Semoga bukan hanya janji."*

Harapan mereka sederhana, tetapi lahir dari pengalaman panjang menghadapi berbagai kesulitan. Dalam perbincangan yang sama, Op. Gabe menceritakan bagaimana keluarganya menjadi korban bencana ekologis. Longsor merusak lahan pertanian, menghancurkan rumah, bahkan merenggut nyawa anggota keluarga dan kerabat mereka.

"Banyak dari kami di kampung ini mengalami kerugian. Pertanian rusak, rumah hanyut dan hancur,

bahkan ada keluarga kami yang menjadi korban. Tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Kami yang menanggung akibatnya, kami yang menderita. Karena itu harapan kami sederhana: jangan lagi ada bencana seperti itu. Kami sudah cukup trauma."

Ucapan itu menggambarkan betapa dalam luka yang masih mereka rasakan hingga hari ini. Percakapan sore itu membuat saya memahami bahwa hubungan masyarakat dengan alam tidak semata-mata hubungan ekonomi. Bagi mereka, alam bukan hanya sumber penghasilan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Hutan, tanah, dan air bukan sekadar sumber daya, tetapi ruang hidup yang menopang keberlangsungan keluarga dan komunitas.

Ketika alam rusak, yang hilang bukan hanya hasil panen. Masyarakat kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai.

Karena itu, tidak mengherankan jika harapan utama masyarakat pasca penutupan TPL bukanlah proyek-proyek besar atau investasi baru. Yang mereka inginkan justru sesuatu yang sangat mendasar: hutan yang pulih, air yang kembali berlimpah, tanah yang subur, dan kehidupan yang terbebas dari ancaman bencana.

Harapan itu terdengar sederhana. Namun sesungguhnya, itulah fondasi dari kehidupan yang bermartabat. Kini, tantangan terbesar berada di tangan pemerintah. Penutupan TPL akan kehilangan maknanya apabila tidak diikuti dengan langkah nyata untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak selama puluhan tahun. Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar keputusan administratif. Mereka membutuhkan kehadiran negara yang sungguh-sungguh berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian alam.

Sebab pada akhirnya, yang diperjuangkan masyarakat bukanlah sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang di tanahnya sendiri, menikmati lingkungan yang sehat, dan mewariskan alam yang lestari kepada generasi yang akan datang.

Berita Sopo

Diskusi Dengan Auditor Eksternal

DOKUMENTASI KSPPM



Pencabutan PBPH TPL di Sopo KSPPM Parapat pada 13–14 Februari 2026.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk merefleksikan perjalanan panjang perjuangan Konsolidasi Komunitas Masyarakat Adat Pasca Pencabutan PBPH TPL di Sopo KSPPM Parapat pada 13–14 Februari 2026.

Awal Februari 2026 KSPPM melaksanakan audit eksternal bersama Kantor Akuntan Publik (KAP) Hananta Budianto, Semarang. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun pencapaian hasil dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen KSPPM dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola lembaga yang baik.

Rangkaian audit diawali dengan kunjungan lapangan ke Komunitas Masyarakat Adat Op. Bolus di Kecamatan Sipahutar. Dalam kunjungan tersebut, auditor berkesempatan berdialog langsung dengan masyarakat untuk melihat perkembangan program yang telah dilaksanakan KSPPM berdasarkan proyek yang telah disepakati bersama sejak awal. Auditor juga mendengarkan pengalaman, pandangan, serta penilaian masyarakat mengenai manfaat program, perubahan yang dirasakan, dan berbagai tantangan yang masih dihadapi selama proses pendampingan berlangsung.

Konsolidasi Komunitas MA Pasca Pencabutan PBPH TPL

Pasca pencabutan izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) melalui SK Nomor 87 Tahun 2026, komunitas-komunitas masyarakat adat dampingan KSPPM bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Sekretariat Bersama Tutup TPL menggelar Konsolidasi Komunitas Masyarakat Adat Pasca

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk merefleksikan perjalanan panjang perjuangan mempertahankan wilayah adat sekaligus menyusun langkah-langkah strategis pasca pencabutan izin TPL. Meski izin perusahaan telah dicabut, masyarakat menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam konsesi TPL masih berstatus kawasan hutan negara sehingga kepastian hukum atas tanah adat menjadi agenda mendesak yang harus segera diperjuangkan.

Melalui forum konsolidasi ini, para peserta mendiskusikan berbagai strategi untuk mengamankan wilayah adat, memperkuat pengorganisasian komunitas, serta mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah. Selain itu, peserta juga membahas berbagai potensi tantangan yang mungkin muncul pasca pencabutan izin perusahaan, termasuk kemungkinan munculnya kebijakan atau investasi baru yang dapat mengancam keberadaan wilayah adat.



DOKUMENTASI KSPPM

Rapat Umum Anggota KSPPM

Pada tanggal 23-25 Februari 2026, KSPPM melaksanakan Rapat Umum Anggota tahun 2026 yang dilaksanakan secara hybrid, melalui ZOOM meeting di TC Parapat. RUA ini dilakukan setiap setahun sekali dan diikuti oleh seluruh badan pendiri dan staf KSPPM. Rapat ini dilakukan untuk membahas dan mengevaluasi kerja-kerja lembaga pada tahun 2025 juga membahas rencana program yang akan dilakukan pada 2026. Pada RUA 2026 dilakukan refleksi teologia yang dibawakan oleh Pdt. Yonki Karman yang mengusung tema RUA adalah “Krisis Ekologis sebagai Cerminan Kegagalan Politik dan Rapuhnya Relasi Spiritual Manusia dengan Alam”



DOKUMENTASI KSPPM

Pelatihan Pokrol

KSPPM menyelenggarakan Pelatihan Pokrol pada 26-28 Maret 2026 di TC KSPPM Parapat. Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang yaitu komunitas adat, serikat tani, mahasiswa dan pemuda gereja.

Pelatihan ini bertujuan melahirkan kader-kader pokrol atau paralegal rakyat yang memiliki pemahaman hukum kritis meskipun tidak menempuh pendidikan hukum formal. Selama tiga hari, peserta dibekali materi mengenai analisis sosial, hukum dan HAM, sejarah dan dinamika konflik agraria, peluang kebijakan dalam pengakuan masyarakat adat, Konsep dan Praksis Reforma Agraria, hingga refleksi teologi dalam perjuangan sosial.

Berbagai pemateri menekankan pentingnya kesadaran hukum, penguatan gerakan akar rumput, dan perjuangan kolektif dalam menghadapi konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, serta kriminalisasi masyarakat adat dan petani. Melalui pelatihan ini, KSPPM berharap lahir kader-kader hukum rakyat yang

mampu mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara kolektif di komunitasnya masing-masing.



DOKUMENTASI KSPPM

Pelatihan Kader Perempuan

Pada 16–18 April 2026, KSPPM melaksanakan Pelatihan Kader Perempuan yang diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari masyarakat adat, petani, dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput sekaligus membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan di komunitas masing-masing.



DOKUMENTASI KSPPM

Dalam pelatihan tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai perspektif dan pengalaman praktis terkait pemberdayaan perempuan. Salah satu materi menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang narasumber, *“Kalau kesetaraan itu semua mendapatkan hal yang sama, seperti pendidikan dan kesempatan menjadi pemimpin. Namun setara belum tentu adil. Perempuan harus diberikan akses dan pendidikan agar tercipta kesetaraan gender.”*

Selain itu, peserta juga diajak merefleksikan peran, tanggung jawab, serta panggilan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sesi refleksi

tersebut ditegaskan bahwa, “Tidak ada hierarki dalam penciptaan, semua sama. Dari struktur puitis kisah penciptaan, yang ditekankan adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah.

4 Mahasiswa IAKN Magang di KSPPM

Selama kurang lebih dua bulan, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) menjalani praktik magang di KSPPM. Dalam proses magang tersebut, mereka tidak hanya mengikuti berbagai diskusi mengenai isu-isu sosial, pertanian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat pedesaan, tetapi juga belajar langsung dari rakyat melalui metode live in.



DOKUMENTASI KSPPM

Melalui metode ini, para mahasiswa tinggal dan berinteraksi bersama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan refleksi yang diperoleh dalam diskusi di sopo ke dalam pengalaman nyata di lapangan. Dengan melihat, mendengar, dan merasakan langsung dinamika kehidupan masyarakat, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, serta nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas. Pengalaman tersebut membantu mereka memahami bahwa pelayanan pastoral tidak hanya berangkat dari teori, tetapi juga dari kedekatan, pendampingan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



DOKUMENTASI KSPPM

Kunjungan Canopy ke KSPPM

Pada 18 Mei 2026, organisasi lingkungan internasional Canopy berkunjung ke Sopo KSPPM Parapat untuk berdiskusi mengenai tindak lanjut pasca pencabutan izin PBPH TPL. Pada pertemuan tersebut Canopy juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pencabutan izin PT TPL yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh masyarakat di Tano Batak. Mereka melihat keputusan tersebut sebagai langkah penting dalam upaya pemulihan lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.



DOKUMENTASI KSPPM



DOKUMENTASI KSPPM

Diskusi dengan BRIN



DOKUMENTASI KSPPM

Jumat, 5 Juni 2026, TC KSPPM Parapat dikunjungi oleh Tim Peneliti dari Brin dan UI. Dalam diskusi tersebut KSPPM dan Tim Peneliti mendiskusikan peran perempuan dalam gerakan sosial Masyarakat Adat. Setelah selesai berdiskusi bersama KSPPM, Brin juga melakukan kunjungan ke komunitas masyarakat adat Natinggir.